

SAVING GROUP PEREMPUAN NELAYAN

**PENGUATAN EKONOMI NELAYAN TRADISIONAL
BERBASIS KOMUNITAS PENGAJIAN PEREMPUAN
DESA KALIUNTU KECAMATAN JENU KABUPATEN TUBAN**

Oleh :

Sri Wigati, M.El

Nailatin Fauziyah, S.Psi., M.Si

Drs. Agus Afandi, M.Fil.I

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT PENDIDIKAN ISLAM
DITJEN PENDIDIKAN TINGGI ISLAM**

2015

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, atas kekuatan dari Allah SWT kami dapat melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat ini. Kerjasama antar tim yang sinergis menjadikan kegiatan ini mencapai pada titik akhir pelaksanaannya.

Dalam kegiatan ini kami melakukan transformasi dan penguatan ekonomi pada perempuan nelayan sebagai upaya memutus mata rantai kemiskinan. Untuk itu, program ini kami fokuskan pada Penguatan Ekonomi Nelayan Tradisional Berbasis Komunitas Pengajian Perempuan Desa Kaliuntu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban.

Besar harapan kami untuk dapat terlibat dalam proses pengentasan kemiskinan. Jalan yang dilaluinya memang berliku, membutuhkan waktu dan energi, serta materi yang tidak sedikit. Tapi paling tidak, dengan program ini kami telah memulainya dari hal yang paling substansi, yaitu peningkatan kapasitas perempuan sebagai salah satu penyangga ekonomi keluarga.

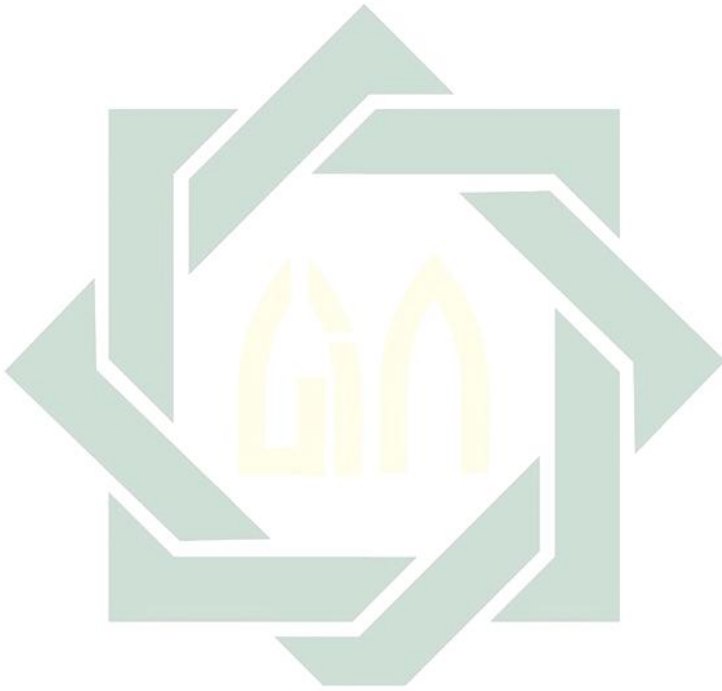
Dengan penuh rasa hormat, terima kasih kami sampaikan kepada segenap jama'ah pengajian Orang tua wali santri Taman Pendidikan al-Qur'an Pondok Pesantren Hidayatus Sholihin Desa Kaliuntu.

Khususnya kepada KH. Sholeh, KH. Saifululloh, Ning Ride, dan segenap anggota jama'ah yang dengan setia mengikuti kegiatan sampai selesai.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini tidak dapat berjalan dengan lancar tanpa bantuan dana dari Ditpertaiss Kementerian Agama RI, untuk itu kami menyampaikan terima kasih pada Ditpertaiss atas hibah program pengabdian kepada masyarakat ini.

Kami yakin, bahwa masih begitu banyak kelemahan dan kekurangan dalam pelaksanaan program ini. Untuk itu, kami mohon kepada segenap pihak untuk memberikan masukan ataupun membuat program lanjutan dari program ini. Karena pada dasarnya, penyelesaian persoalan kemiskinan membutuhkan waktu yang panjang, yang kami lakukan ini hanyalah sebagian kecil dari rantai-rantai perubahan yang musti dikawal oleh berbagai pihak.

Surabaya, 2015



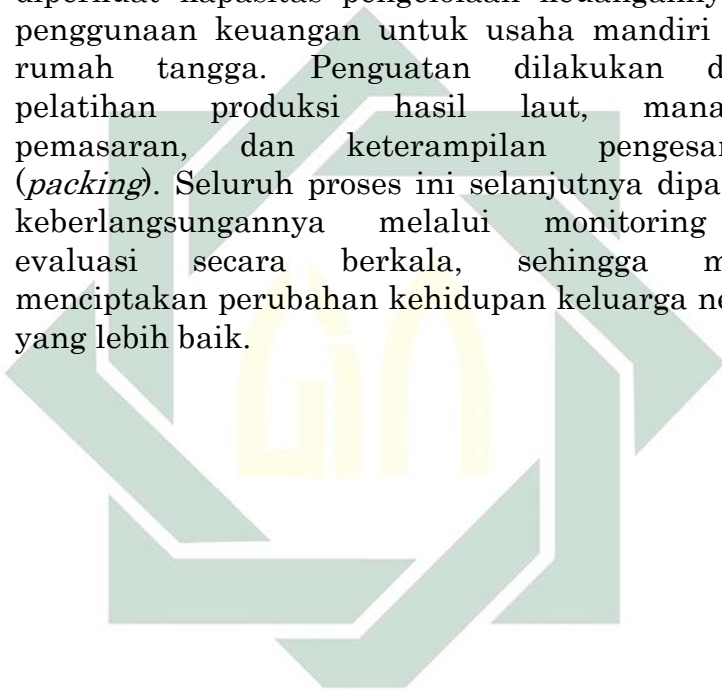
ABSTRAK

Program pemberdayaan perempuan nelayan Desa Kaliuntu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban Jawa Timur difokuskan pada hal utama, yaitu problem kerentanan keluarga nelayan yang terkait dengan aspek kebutuhan ekonomi, khususnya ketika mengalami paceklik yaitu musim angin besar (*barat*). Oleh karena itu fokusnya adalah pada penguatan perempuan dari aspek kelompok yang berbasis pada tradisi keagamaan lokal, yaitu melalui forum silaturahmi wali santri pondok pesantren. Pola pemberdayaan dibangun melalui forum-forum perempuan nelayan dengan menyentuh aspek kesadaran mereka sendiri.

Proses tersebut dimulai dari membangun kesaadaran melalui *Focus Group Discussion* (FGD). Melalui FGD dapat ditemukan problem-problem yang mereka alami, sekaligus mengetahui potensi-potensi yang mereka miliki. Melalui FGD pula dapat dibangun bertemunya pikiran (*meeting of mind*) antara tim pemberdayaan dengan anggota komunitas, sehingga dapat melangkah bersama untuk bertindak menyelesaikan problem yang mereka alami berdasarkan potensi yang mereka miliki.

Gerakan bersama komunitas perempuan nelayan dimulai dengan membentuk kelompok *saving group* (simpan pinjam) dalam bentuk *Forum Silaturahmi Wali Santri Pondok Pesantren Hidayatus Sholihin*.

Dilanjutkan dengan menata sistemnya, baik kepengurusan organisasinya, mekanisme simpan pinjamnya, dan aturan keanggotaanya. Selanjutnya diperkuat kapasitas pengelolaan keuangannya dan penggunaan keuangan untuk usaha mandiri mikro rumah tangga. Penguatan dilakukan dengan pelatihan produksi hasil laut, manajemen pemasaran, dan keterampilan pengemasan (*packing*). Seluruh proses ini selanjutnya dipastikan keberlangsungannya melalui monitoring dan evaluasi secara berkala, sehingga mampu menciptakan perubahan kehidupan keluarga nelayan yang lebih baik.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar		2
Abstrak		
.....		3
Daftar Isi		
Bab I	: Perempuan Nelayan Dan Kemiskinan	
	A. Pendahuluan	5
	B. Kondisi Dampungan Yang Diharapkan	12
	C. Strategi Yang Dilakukan	16
Bab II	: Pemberdayaan Masyarakat Nelayan	
	A. Pemberdayaan Masyarakat Nelayan	18
	B. Pemberdayaan Ekonomi Nelayan	20
	C. Strategi Pemberdayaan Masyarakat	22
Bab III	: Masyarakat Pesisir Yang Terpinggir	
	A. Demografi Kabupaten Tuban	28
	B. Desa Kaliuntu, Kemiskinan Di Pinggiran Industri strategis	34
	D. Lingkar Kemiskinan Nelayan Kaliuntu	38

Bab IV	: Dinamika Proses Pelaksanaan Program	
	A. Focus Group Discussion (FGD) Tentang Potensi Perempuan Dalam Proses Penguatan Penyangga Ekonomi Keluarga Nelayan Tradisional.....	42
	B. Pengorganisasian Kelompok Perempuan Nelayan	47
	C. Pelatihan Alternatif Pengolahan Hasil Laut	52
	D. Pelatihan Management Pemasaran	53
	E. Pelatihan Packing Produk Hasil Laut	55
	F. Monitoring dan Evaluasi	57
BAB V	: Refleksi Hasil Proses Pemberdayaan	59
BAB VI	: Penutup	
	A. Kesimpulan.....	63
	B. Saran dan rekomendasi.....	64

Daftar Pustaka
Lampiran

BAB I PEREMPUAN NELAYAN DAN KEMISKINAN

A. Latar belakang

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Kusnadi (2001), bahwa mobilitas vertikal nelayan dapat terjadi berkat dukungan pada istri mereka yang memiliki kecakapan berdagang. Keterlibatan istri dalam kegiatan perdagangan sangat terbuka lebar karena system pembagian kerja secara seksual memungkinkannya dan sesuai dengan situasi geososial masyarakat nelayan. Dalam system pembagian kerja ini, nelayan bertanggungjawab terhadap urusan menangkap ikan (ranah laut), sedangkan kaum perempuan mereka bertanggungjawab terhadap urusan domestic dan public (ranah darat). Sistem pembagian kerja ini memberikan tempat terhormat bagi istri/perempuan nelayan dalam keluarga dan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, para pedagang ikan yang sukses biasanya juga merupakan istri-istri pemilik perahu. Namun demikian, rumah tangga nelayan yang benar-benar sukses secara ekonomis hanya merupakan kelompok kecil dari masyarakat (Kusnadi, 2008: 6).

Dalam mengembangkan kegiatan atau usaha nonperikanan di darat, kaum perempuan harus diberi peluang peran yang besar. Peran perempuan ini lebih efektif karena sesuai dengan system pembagian kerja secara seksual yang berlaku pada masyarakat nelayan. Etos kerja rumah tangga nelayan miskin cukup tinggi karena mereka sudah teruji untuk bias bekerja apa saja, asalkan bias menjamin kelangsungan hidupnya (Kusnadi, 2008: 36).

Kemiskinan yang merupakan indikator ketertinggalan masyarakat pesisir ini disebabkan paling tidak oleh tiga hal utama, yaitu (1) kemiskinan struktural, (2) kemiskinan super-struktural, dan (3) kemiskinan kultural.

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan karena pengaruh faktor atau variabel eksternal di luar individu. Variabel-variabel tersebut adalah struktur sosial ekonomi masyarakat, ketersediaan insentif atau disinsentif pembangunan, ketersediaan fasilitas pembangunan, ketersediaan teknologi, dan ketersediaan sumberdaya pembangunan khususnya sumberdaya alam. Hubungan antara variabel-variabel ini dengan kemiskinan umumnya bersifat terbalik. Artinya semakin tinggi intensitas, volume dan kualitas

variabel-variabel ini maka kemiskinan semakin berkurang. Khusus untuk variabel struktur sosial ekonomi, hubungannya dengan kemiskinan lebih sulit ditentukan. Yang jelas bahwa keadaan sosial ekonomi masyarakat yang terjadi di sekitar atau di lingkup nelayan menentukan kemiskinan dan kesejahteraan mereka.

Kemiskinan super-struktural adalah kemiskinan yang disebabkan karena variabelvariabel kebijakan makro yang tidak begitu kuat berpihak pada pembangunan nelayan. Variabelvariabel superstruktur tersebut diantaranya adanya kebijakan fiskal, kebijakan moneter, ketersediaan hukum dan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan yang diimplementasikan dalam proyek dan program pembangunan. Kemiskinan super-struktural ini sangat sulit diatasi bila saja tidak disertai keinginan dan kemauan secara tulus dari pemerintah untuk mengatasinya. Kesulitan tersebut juga disebabkan karena kompetisi antar sektor, antar daerah, serta antar institusi yang membuat sehingga adanya ketimpangan dan kesenjangan pembangunan.

Kemiskinan super-struktural ini hanya bisa diatasi apabila pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah, memiliki komitmen khusus dalam

bentuk tindakan-tindakan yang bias bagi kepentingan masyarakat miskin. Dengan kata lain *affirmative actions*, perlu dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan karena variabel-variabel yang melekat, inheren, dan menjadi gaya hidup tertentu. Akibatnya sulit untuk individu bersangkutan keluar dari kemiskinan itu karena tidak disadari atau tidak diketahui oleh individu yang bersangkutan. Variabel-variabel penyebab kemiskinan kultural adalah tingkat pendidikan, pengetahuan, adat, budaya, kepercayaan, kesetiaan pada pandangan-pandangan tertentu, serta ketaatan pada panutan. Kemiskinan secara struktural ini sulit untuk diatasi. Umumnya pengaruh panutan (*patron*) baik yang bersifat formal, informal, maupun asli (*indigenous*) sangat menentukan keberhasilan upaya-upaya pengentasan kemiskinan kultural ini. Penelitian di beberapa negara Asia yang masyarakatnya terdiri dari beberapa golongan agama menunjukkan juga bahwa agama serta nilai-nilai kepercayaan masyarakat memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap status sosial ekonomi masyarakat dan keluarga. Para pakar ekonomi

sumberdaya melihat kemiskinan masyarakat pesisir, khususnya nelayan lebih banyak disebabkan karena faktor-faktor sosial ekonomi yang terkait karakteristik sumberdaya serta teknologi yang digunakan. Faktor-faktor yang dimaksud membuat sehingga nelayan tetap dalam kemiskinannya.

Panayotou (1992) mengatakan bahwa nelayan tetap mau tinggal dalam kemiskinan karena kehendaknya untuk menjalani kehidupan itu (*preference for a particular way of life*). Pendapat Panayotou (1992) ini dikalimatkan oleh Subade dan Abdullah (1993) dengan menekankan bahwa nelayan lebih senang memiliki kepuasan hidup yang bisa diperolehnya dari menangkap ikan dan bukan berlaku sebagai pelaku yang semata-mata beorientasi pada peningkatan pendapatan. Karena *way of life* yang demikian maka apapun yang terjadi dengan keadaannya, hal tersebut tidak dianggap sebagai masalah baginya. *Way of life* sangat sukar dirubah. Karena itu maka meskipun menurut pandangan orang lain nelayan hidup dalam kemiskinan, bagi nelayan itu bukan kemiskinan dan bisa saja mereka merasa bahagia dengan kehidupan itu.

Sebab kemiskinan yang bersifat internal berkaitan dengan kondisi internal sumber daya manusia nelayan dan aktivitas kerja mereka. Sebab-sebab internal ini mencakup masalah: (1) keterbatasan kualitas sumberdaya manusia nelayan, (2) keterbatasan kemampuan modal usaha dan teknologi penangkapan, (3) hubungan kerja (pemilik perahu-nelayan buruh), (4) kesulitan melakukan disverifikasi usaha penangkapan, (5) ketergantungan yang tinggi terhadap okupasi melaut, dan (6) gaya hidup yang dipandang “boros” sehingga kurang berorientasi masa depan. Sedangkan sebab kemiskinan yang bersifat eksternal berkaitan dengan kondisi di luar diri dan aktivitas kerja nelayan. Sebab-sebab eksternal ini mencakup masalah : (1) kebijakan pembangunan perikanan yang lebih berorientasi pada produktivitas untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional dan parsial, (2) system pemasaran hasil perikanan yang lebih menguntungkan pedagang perantara, (3) kerusakan-kerusakan karang, dan konversi hutan bakau di kawasan pesisir, (4) penggunaan peralatan tangkap yang tidak ramah lingkungan, (5) penegakan hukum yang lemah terhadap perusak lingkungan, (6) terbatasnya teknologi pengolahan hasil tangkapan pascapanen,

(7) terbatasnya peluang-peluang kerja di sector non perikanan yang tersedia di desa-desa nelayan, (8) kondisi alam dan fluktuasi musim yang tidak memungkinkan nelayan melaut sepanjang tahun, dan (9) isolasi geografis (Kusnadi, 2008: 18-19).

Pemberdayaan masyarakat secara khusus dan eksistensi masyarakat secara umum perlu diinternalisasikan dalam pengembangan, perencanaan, serta pelaksanaan pengelolaan sumberdaya pesisir secara terpadu. Beberapa aspek yang berkenaan dengan masyarakat adalah kekuatan penentu (*driving forces*) status dan eksistensi suatu kawasan pesisir. Kekuatan tersebut perlu dilibatkan atau diperhitungkan dalam menyusun konsep pengelolaan sumberdaya secara terpadu. Kekuatan-kekuatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk pesisir yang cenderung bertambah dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi.
2. Kemiskinan yang diperburuk oleh sumberdaya alam yang menurun, degradasi habitat, serta kelangkaan mata pencaharian alternatif.
3. Adanya usaha skala besar, menghasilkan keuntungan dengan segera, dan usaha komersial yang menurunkan kualitas sumberdaya dan

sering menyebabkan konflik kepentingan dengan penduduk lokal.

4. Kurang sadar dan pengertian di pihak masyarakat serta pemerintahan lokal tentang pentingnya keberlanjutan sumberdaya bagi kepentingan manusia.
5. Kurang pengertian di pihak masyarakat tentang kontribusi dan pentingnya sumberdaya pesisir bagi masyarakat.
6. Kurang pengertian pemerintahan lokal tentang tindak lanjut dan keberlanjutan kegiatan pemberdayaan masyarakat
7. Faktor budaya yang berkaitan langsung pengelolaan dan pemanfaatan kawasan pesisir secara terpadu.

Program pengabdian masyarakat ini mengacu pada 8 tujuan dalam pembangunan MDGs pada point *Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan*. Sedangkan fokus pengabdian ini mengarah pada hasil pemetaan persoalan perempuan dalam pembangunan MDGs yaitu fokus pada *Perempuan dan Ekonomi, Perempuan dan Kemiskinan*.

Adapun program yang hendak dilakukan untuk menterjemahkan hal tersebut adalah pemberdayaan ekonomi perempuan nelayan dengan meningkatkan

pemahaman perempuan akan pentingnya manajemen keuangan keluarga dan ketrampilan perempuan dalam mengolah hasil laut. Sehingga nelayan tidak hanya menjual ikan mentahnya saja, namun ada produk lain yang dapat dihasilkan.

Desa Kaliuntu Kecamatan Jenu merupakan daerah kategori masyarakat miskin. Daerah ini sangat berbeda dengan beberapa daerah lain yang berada di kecamatan Jenu pada umumnya. Dari aspek geografis pun berbeda, yaitu terpisah jalan raya jalur Pantura. Mayoritas mata pencaharian masyarakat Kaliuntu adalah Nelayan tradisional. Berdasarkan assesment awal, kondisi nelayan tradisional Desa Kaliuntu ini menunjukkan bahwa :

1. Kondisi social ekonomi rumah tangga nelayan tergolong miskin.
2. Minimnya peran perempuan dalam proses penyangga ekonomi keluarga
3. Adanya bias gender dalam relasi sosial dan relasi dalam keluarga
4. Minimnya pendidikan para istri nelayan (mayoritas lulusan SD)
5. Masih adanya anak-anak yang tidak bersekolah/putus sekolah. Hal ini disebabkan karena minimnya alokasi dana untuk pendidikan

anak-anak dan dilibatkannya anak-anak dalam pekerjaan melaut.

6. Keterbatasan ketrampilan dan pengetahuan perempuan yang berdampak pada minimnya kreativitas untuk mengembangkan potensi yang bernilai ekonomi.

Berangkat dari beberapa hal di atas, Desa Kaliuntu merupakan daerah yang tepat untuk dijadikan desa binaan atau dampingan. Masyarakat Kaliuntu termasuk dalam kategori masyarakat miskin. Penyebab kemiskinannya dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. *Kemiskinan kultural*, yaitu kemiskinan yang disebabkan karena variabel-variabel yang melekat, inheren, dan menjadi gaya hidup tertentu. Akibatnya sulit untuk individu bersangkutan keluar dari kemiskinan itu karena tidak disadari atau tidak diketahui oleh individu yang bersangkutan. Variabel-variabel penyebab kemiskinan kultural adalah tingkat pendidikan, pengetahuan, adat, budaya, kepercayaan, kesetiaan pada pandangan-pandangan tertentu, serta ketaatan pada panutan kemiskinan yang disebabkan karena pengaruh faktor atau variabel eksternal di luar individu. *Kemiskinan struktural* yaitu variabel-variabelnya adalah struktur sosial ekonomi masyarakat, ketersediaan insentif atau disinsentif

pembangunan, ketersediaan fasilitas pembangunan, ketersediaan teknologi, dan ketersediaan sumberdaya pembangunan khususnya sumberdaya alam. *Kemiskinan super-struktural*, yaitu kemiskinan yang disebabkan karena variabel-variabel kebijakan makro yang tidak begitu kuat berpihak pada pembangunan nelayan. Variabel-variabel superstruktur tersebut diantaranya adanya kebijakan fiskal, kebijakan moneter, ketersediaan hukum dan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan yang diimplementasikan dalam proyek dan program pembangunan.

Program pemerintah tentang pemberdayaan ekonomi nelayan selama ini hanya fokus pada pemberian atau peminjaman peralatan penangkapan ikan, perahu, dan mesin, tanpa mempertimbangkan keadaan sosial ekonomi masyarakat nelayan tradisonal. Istri nelayan hampir kurang tersentuh program pembangunan. Oleh karena itu, proses pemberdayaan dalam program pengabdian ini mengambil perempuan sebagai pintu masuk dalam melakukan perubahan sosial. Sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan pada rapat koordinasi PSG di Jakarta, bahwa Pemberdayaan perempuan menjadi keharusan untuk membangun masyarakat dan

bangsa Indonesia. Dengan demikian potensi perempuan yang selama ini belum optimal di masa depan akan lebih maju. Untuk itu semua pihak hendaknya melakukan langkah strategis guna mewujudkan cita-cita luhur membangun kehidupan yang berkeimbangan.

Ada lima permasalahan utama yang menjadi pokok perhatian dalam pembangunan pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak tahun 2004-2009. Rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik dan hukum. Masih tingginya jumlah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaisalah satu bentuk pelanggaran hak asasi perempuan dan anak. Masih rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak. Rendahnya pencapaian indeks pembangunan manusia (HDI dan GDI) dan indeks pemberdayaan gender (GEM) dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Masih banyak hukum dan peraturan perundang undangan yang bias gender sehingga menghambat upaya mengubah *mindset* (pola pikir, pola sikap dan pola tindak) yang berperspektif gender. Lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutaman gender dan anak, termasuk ketersediaan data terpilah dan

rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyikapi berbagai isu-isukesenjangan gender dan anak.

Pada situasi krisis dimana cuaca sangat ekstrim dan nelayan tidak melaut, para nelayan tidak memiliki pekerjaan alternatif. Seringkali mereka malah berperilaku mabuk-mabukan. Situasi ini sangat rentan dengan kekerasan terhadap istri dan anak. Berdasarkan hasil interview dengan beberapa masyarakat sekitar, untuk mengatasi kondisi ekonomi pada saat situasi krisis ini, para istri seringkali melakukan pekerjaan mengemis bersama anaknya, atau prostitusi.

Konstruksi sosial yang cenderung patriarkhi menempatkan perempuan pada peran-peran subordinate. Secara sosial statusnya tidak jelas, hanya mengikuti suami. Sedangkan pada peran ekonomi keluarga perempuan cenderung di tempatkan pada pengelola khusus kebutuhan yang bersifat rutinitas keseharian misalnya makan sehari-hari. Perempuan kurang dilibatkan dalam proses penyangga ekonomi keluarga. Bila dalam kondisi paceklik, dimana suami merasa tidak bisa lagi menyangga ekonomi keluarga, perempuan dibiarkan mengambil peran atau bahkan dipaksa untuk berperan penyangga ekonomi keluarga dengan melakukan hal yang

diluar kehendaknya, misalnya mengemis atau melakukan tindakan prostitusi.

B. Kondisi Dampungan Yang Diharapkan

Fenomena maraknya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari 3 segi : *Pertama* Pemberdayaan dipandang sebagai jawaban atas pengalaman pelaksanaan pembangunan yang didasari oleh kebijakan yang terpusat sejak tahun 1970-an hingga tahun 1990-an. Meskipun banyak pihak menyatakan bahwa pendekatan terpusat cocok pada masa itu dengan beberapa alasan, namun sebagian menyatakan bahwa keengganan atau kealpaan pemerintah pusat untuk memberikan ruang partisipasi lebih luas kepada rakyat sebagai end user kebijakan public ternyata telah menyebabkan matinya inovasi dan kreasi rakyat untuk akhirnya berani mengadopsi konsep pemberdayaan yang dipercayai mampu menjembatani [artisipasi rakyat dalam proses pembangunan. Pemberdayaan ditantang untuk dapat menumbuhkan kembali inovasi dan kreativitas rakyat.

Kedua, Pemberdayaan dipandang sebagai jawaban atau tantangan konsep pertumbuhan yang mendominasi pemikiran para pengambil kebijakan public yang nyata cenderung melupakan kebutuhan

rakyat pada level akar rumput. Untuk menjamin penyaluran asset pembangunan lebih baik kepada rakyat lahirah konsep distribusi pembangunan. Dalam konsep pertumbuhan, pemanfaatan pembangunan adalah pelaku usaha besar. Dalam konsep distribusi pembangunan, pemanfaat pembangunan adalah rakyat pada level akar rumput. Para pengambil kebijakan public percaya bahwa konsep distribusi pembangunan dapat beriringan dengan konsep pertumbuhan ekonomi apabila konsep distribusi pembangunan menerapkan konsep pemberdayaan. Jika pada masa lalu asset pembangunan lebih banyak dinikmati oleh pelaku industri berskala besar, dalam distribusi pembangunan, asset pembangunan akan semakin dimanfaatkan sendiri oleh rakyat pada level paling bawah. Penerapan konsep pemberdayaan masyarakat dengan demikian akan mampu menjawab tantangan melaksanakan distribusi pembangunan secara lebih baik. Dalam perkembangan selanjutnya, konsep ini akan lebih dikenal sebagai *distribution with growth*. Akhirnya, pemberdayaan ditantang untuk dapat menjamin distribusi asset pembangunan secara merata dengan proses dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.

Ketiga, Pemberdayaan dipandang sebagai jawaban atas nasib rakyat yang masih banyak didominasi oleh penduduk miskin, pengangguran, masyarakat dengan kualitas hidup rendah, dan masyarakat terbelakang/tertinggal di sejumlah daerah di Indonesia. Sebagaimana dinyatakan oleh pemikir pembangunan, pembangunan di Negara berkembang banyak diwarnai fenomena kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan. Sehingga muncul pandangan bahwa konsep pertumbuhan tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Akhirnya, mereka melirik konsep pemberdayaan untuk mencoba menjawab tantangan pembangunan di Indonesia. Dengan demikian, konsep pemberdayaan di Indonesia bukan tanpa nilai, tetapi justru mempunyai nilai spirit untuk menuntaskan permasalahan khas Negara berkembang seperti dikatakan diatas. Lebih khusus pemberdayaan mempunyai misi yang jelas, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin (Wrihatnolo & Dwidjowijoto, 2007;30-32).

Mengapa harus pemberdayaan masyarakat? Untuk menjawabnya, paling tidak ada 5 argumentasi dasar berikut (Wrihatnolo & Dwidjowijoto, 2007;37-40):

Pertama, ***demokratisasi proses pembangunan***. Konsep pemberdayaan dipercaya mampu menjawab tantangan pelibatan aktif warganegara (baca : rakyat) dalam proses pembangunan, mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasinya. Salah satu pendekatan untuk mendemokratisasikan proses pembangunan adalah memberikan peluang sebesar-besarnya kepada lapisan masyarakat paling bawah (*grass-root*, baca : rakyat miskin) untuk terlibat dalam pengalokasian sumberdaya pembangunan. Inilah hakikat konsep pembangunan yang diarahkan oleh rakyat atau dalam istilah lain disebut pembangunan yang digerakkan oleh masyarakat (*community driven development*). Proses ini diyakini mampu menjadi wahana pembelajaran pencerdasan bagi rakyat untuk mengenali kebutuhannya sendiri serta melaksanakan dan melestarikan upaya untuk memenuhi kebutuhannya itu. Penerapan konsep pemberdayaan dengan demikian mempunyai efek samping dalam bentuk mampu memberikan jalan terlaksananya penyelenggaraan ketatanegaraan secara baik.

Kedua, ***penguatan peran organisasi kemasyarakatan local***. Konsep pemberdayaan dipercaya mampu menjawab tantangan bagaimana melibatkan

organisasi kemasyarakatan local berfungsi dalam pembangunan. Organisasi kemasyarakatan local merupakan pemegang peran sentral terjadinya perubahan sosial karena merekalah yang paling mengerti karakter lapisan masyarakat paling bawah. Dalam mekanisme manajemen pembangunan modern, peran mereka harus diorganisasikan secara hierarkis agar informasi tentang situasi terkini dapat dijalin secara kemasyarakatan dalam mendampingi rakyat miskin sangat bervariasi, mulai sebagai inisiator, hingga fasilitator.

Ketiga, *penguatan modal sosial*. Konsep pemberdayaan diyakini mampu menggali dan memperkuat ikatan sosial diantara para warganegara (baca : warga masyarakat). Penguatan modal sosial mengandung arti pelebagaan nilai-nilai luhur yang bersifat universal, yaitu kejujuran, kebersamaan, dan kepedulian. Penguatan modal sosial merupakan motivasi dasar setiap kegiatan yang dapat menjadi spirit (pemacu) perwujudan tujuan pemberdayaan itu sendiri. Proses pemberdayaan dengan sendirinya mampu menciptakan kultur masyarakat yang mandiri, menciptakan hubungan harmonis di antara rakyat dan pamong praja.

Keempat, ***penguatan kapasitas birokrasi local***. Konsep pemberdayaan secara khusus diyakini mampu meningkatkan fungsi pelayanan public dan pemerintahan khususnya kepada penduduk setempat. Konsep pemberdayaan memaksa jajaran pemerintah local memberikan perhatian lebih besar kepada rakyatnya agar rakyat dapat memperoleh dan memenuhi kebutuhan hidupnya baik fisik maupun non-fisik secara mudah. Dalam proses pemberdayaan –akhirnya- karena rakyatnya bertambah cerdas, pada akhirnya mereka mampu memaksa para penyelenggara pelayanan public dan pemerintahan untuk belajar memahami dan melayani rakyatnya lebih baik.

Kelima, ***mempercepat penanggulangan kemiskinan***. Konsep pemberdayaan dalam bentuknya yang paling menonjol di yakini dapat mempercepat tujuan penanggulangan kemiskinan, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin, karena dengan pendekatan pemberdayaan ini para penyelenggara pembangunan –baik pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan- dituntut memberikan pemihakan dan perlindungan kepada rakyat miskin. Pemihakan dan perlindungan kepada rakyat miskin. Pemihakan dilakukan dengan senantiasa mengalokasikan sumber daya pembangunan untuk rakyat miskin.

Karakter local harus menjadi landasan dalam pemihakan agar antara peluang dan aspirasi dapat terartikulasikan secara baik. Perlindungan dilakukan dengan senantiasa membela rakyat miskin dalam berbagai aspeknya yang positif. Rakyat miskin harus senantiasa dilindungi dan didampingi agar memiliki kekuatan untuk meraih (mengakses) sumber daya ekonomi. Oleh karena itu, peran pendamping sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan ini.

Berdasarkan konsep pembangunan, dari proses pendampingan yang dilakukan harapan jangka panjangnya meliputi :

1. Tersedianya dan terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang terdiri dari sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan.
2. Tersedianya prasarana dan sarana produksi secara lokal yang memungkinkan masyarakat dapat memperolehnya dengan harga murah dan kualitas yang baik.
3. Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat sebagai wadah aksi kolektif (*collective action*) untuk mencapai tujuan-tujuan individu.
4. Terciptanya kegiatan-kegiatan ekonomi produktif di daerah yang memiliki ciri-ciri berbasis sumberdaya lokal (*resource-based*), memiliki

pasar yang jelas (*market-based*), dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan kapasitas sumberdaya (*environmental-based*), dimiliki dan dilaksanakan serta berdampak bagi masyarakat lokal (*local society-based*), dan dengan menggunakan teknologi maju tepat guna yang berasal dari proses pengkajian dan penelitian (*scientific-based*).

5. Terciptanya hubungan transportasi dan komunikasi sebagai basis atau dasar hubungan ekonomi antar kawasan pesisir serta antara pesisir dan pedalaman.
6. Terwujudnya struktur ekonomi Indonesia yang berbasis pada kegiatan ekonomi di wilayah pesisir dan laut sebagai wujud pemanfaatan dan pendayagunaan sumberdaya alam laut.

Sedangkan harapan pada jangka pendeknya meliputi :

1. Perempuan memiliki ketrampilan diri (*self skill*) yang bernilai ekonomi sehingga dapat berperan dalam proses penyangga ekonomi keluarga
2. Meningkatnya income keluarga nelayan tradisional melalui melibatkan perempuan dalam proses penyangga ekonomi keluarga
3. Terbentuknya komunitas atau kelompok perempuan nelayan tradisional

4. Terciptanya relasi yang sadar gender

C. Strategi Yang Dilakukan

Langkah yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan jangka pendek tersebut adalah sebagai berikut:

1. FGD (*Focused Group Discussion*)

Kegiatan ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi perempuan nelayan tradisional Desa Kaliuntu dalam proses penguatan penyangga ekonomi keluarga. FGD ini juga dimaksudkan sebagai media menilai kebutuhan (*needs assessment*) perempuan nelayan sebagai bagian dari penyangga ekonomi keluarga.

2. Pengkayaan manajemen keuangan keluarga

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pengkayaan wawasan dan ketrampilan pada perempuan dalam melakukan pengelolaan keuangan rumah tangga.

3. Pembentukan simpan-pinjam kelompok pengajian

Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan pengorganisasian kelompok pengajian sebagai wadah melatih perempuan untuk gemar menabung dan mendapatkan bantuan untuk usaha.

4. Pelatihan keterampilan bagi perempuan nelayan
Pelatihan ini ditujukan bagi perempuan nelayan anggota pengajian yang tidak memiliki keterampilan atau belum memiliki kesibukan selain menjadi ibu rumah tangga murni. Hal ini diharapkan akan memberikan penguatan ekonomi, sehingga bisa menjadi pilar ekonomi kedua setelah suami.
5. Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dilakukan untuk melihat perkembangan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kelompok pengajian. Sedangkan evaluasi berfungsi untuk melakukan analisa terhadap pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat dimunculkan upaya-upaya penanganan atau tindak lanjut dari hasil evaluasi tersebut.

BAB II

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN

A. Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

Kondisi kemiskinan yang dialami masyarakat sampai saat ini, mengajarkan kepada akademisi bahwa upaya untuk mengentas masyarakat dari kemiskinan dan memecahkan masalah pengangguran diperlukan upaya-upaya yang memihak masyarakat, memberi perlindungan, persamaan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya dan membiarkan masyarakat miskin untuk memintal sendiri jaring-jaring sosial dan kemampuannya untuk dapat memperkuat posisi tawarnya.

Secara lebih rinci, terdapat empat upaya prioritas yang harus dikembangkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin : *Pertama*, memperkuat posisi tawar dan memperkecil ketergantungan masyarakat miskin dari kelas sosial di atasnya dengan cara memperbesar kemungkinan mereka melakukan diversifikasi usaha. *Kedua*, memberikan bantuan

permodalan kepada masyarakat miskin dengan bunga yang rendah dan berkelanjutan. *Ketiga*, memberi kesempatan kepada masyarakat miskin untuk dapat ikut terlibat menikmati hasil keuntungan dari produknya dengan cara menetapkan harga yang adil. *Keempat*, mengembangkan kemampuan masyarakat miskin agar memiliki ketrampilan dan keahlian untuk memberi "nilai tambah" pada produk dan hasil usahanya.

Upaya pengentasan kemiskinan yang dianjurkan menurut kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat, tidak lain adalah kebijaksanaan yang memberi ruang gerak, fasilitas publik dan menciptakan kesempatan-kesempatan yang kondusif bagi maraknya kemampuan dan kemungkinan kelompok masyarakat miskin untuk mengatasi masalah mereka sendiri dan tidak menekan serta mendesak mereka ke pinggir-pinggir atau ke posisi ketergantungan. (Suyanto; 1995 : 214)

Pemberdayaan masyarakat menurut Notoatmodjo (2003) adalah proses pemberian informasi secara terus menerus dan berkesinambungan mengikuti perkembangan

sasaran, serta proses membantu sasaran, agar sasaran tersebut berubah dari tidak tahu menjadi tahu atau sadar (*aspek knowledge*), dari tahu menjadi mau (*aspek attitude*), dan dari mau menjadi mampu melaksanakan perilaku yang diperkenalkan (*aspek practice*).

Sasaran utama pemberdayaan masyarakat adalah individu dan keluarga, serta kelompok masyarakat. Dalam mengupayakan agar seseorang tahu dan sadar, kuncinya terletak pada keberhasilan membuat orang tersebut memahami bahwa sesuatu adalah masalah baginya dan bagi masyarakatnya. Sepanjang orang yang bersangkutan belum mengetahui dan menyadari bahwa sesuatu itu merupakan masalah, maka orang tersebut tidak akan bersedia menerima informasi apapun lebih lanjut. Manakala ia telah menyadari masalah yang dihadapinya, maka kepadanya harus diberikan informasi umum lebih lanjut tentang masalah yang bersangkutan (Depkes RI, 2006). Bila mana sasaran sudah akan berpindah dari mau ke mampu melaksanakan, boleh jadi akan terkendala oleh dimensi ekonomi. Dalam hal ini kepada yang bersangkutan dapat diberikan bantuan langsung, tetapi yang seringkali dipraktikkan

adalah dengan mengajaknya dalam proses pengorganisasian masyarakat (*community organization*) atau pembangunan masyarakat (*community development*).

Menurut Kusnadi (2009) pemberdayaan masyarakat nelayan diartikan sebagai usaha-usaha sadar yang bersifat terencana, sistematis, dan berkesinambungan untuk membangun kemandirian sosial, ekonomi, dan politik masyarakat nelayan dengan mengelola potensi sumber daya yang mereka miliki untuk mencapai kesejahteraan sosial yang bersifat berkelanjutan.

Kegiatan pengorganisasian masyarakat dapat diawali dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan kesadaran kritis masyarakat melalui serangkaian kegiatan diskusi kelompok terarah atau *focused group discussion* (FGD) dan pemetaan swadaya atau *survey kampung sendiri* (SKS) sebagai upaya mendorong masyarakat membahas bersama persoalan riil di bidang ekonomi.

B. Pemberdayaan Ekonomi Nelayan

Diperlukan prasyarat/kondisi dan proses yang sistemik didalam pemberdayaan ekonomi rakyat

terutama yang tergolong masyarakat miskin, seperti masyarakat nelayan tradisional di pedesaan. Prasyarat/kondisi yang dimaksudkan adalah: (1) adanya kondisi pemberdayaan; (2) memberikan kesempatan agar masyarakat semakin berdaya; (3) perlindungan agar keberdayaan dapat berkembang; (4) meningkatkan kemampuan agar semakin berdaya, dan (5) fungsi pemerintah. Sedangkan proses pemberdayaan masyarakat miskin dapat dilakukan secara bertahap melalui tiga fase yaitu: (1) fase inisial, dimana pemerintah yang paling dominan dan rakyat bersifat pasif; (2) fase partisipatoris; dimana proses pemberdayaan berasal dari pemerintah bersama masyarakat, dan (3) fase emansipatoris, masyarakat sudah dapat menemukan kekuatan dirinya sehingga dapat melakukan pembaharuan-pembaharuan dalam mengaktualisasikan dirinya (Pranaka & Prijono, 1996).

Bermuara pada tiga sasaran pokok yaitu: (1) meningkatnya pendapatan masyarakat di tingkat bawah dan menurunnya jumlah penduduk yang terdapat di bawah garis kemiskinan; (2) berkembangnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kegiatan sosial ekonomi produktif

masyarakat di daerah pedesaan; dan (3) berkembangnya kemampuan masyarakat dan meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat, baik aparat maupun warga (Sumodiningrat 2000), dan dilakukan melalui tiga arah yaitu: (1) penciptaan suasana dan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*); (2) penguatan potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*); dan (3) perlindungan (*protecting*) terhadap pihak yang lemah agar jangan bertambah lemah serta mencegah terjadi persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi yang kuat atas yang lemah (Kartasasmita, 1996), serta menggunakan tiga pendekatan, yaitu: *pertama*, pendekatan yang terarah, artinya pemberdayaan masyarakat harus terarah yakni berpihak kepada orang miskin, *kedua*, pendekatan kelompok, artinya secara bersama-sama untuk memudahkan pemecahan masalah yang dihadapi. *Ketiga*, pendekatan pendampingan, artinya selama proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok masyarakat miskin perlu didampingi oleh pendamping yang profesional sebagai fasilitator, komunikator, dan dinamisator terhadap kelompok untuk mempercepat tercapainya kemandirian (Kartasasmita, 1996 *dalam* Soegijoko, 1997).

Merumuskan model pemberdayaan ekonomi nelayan tradisional harus memperhatikan karakteristik mereka (Frith 1967 *dalam* Mubyarto 1994), secara geografis mereka sebagai sebuah masyarakat yang memiliki kebudayaan tertentu yang menjadi pembeda dengan kelompok sosial lainnya (Kusnadi, 2009), dan mereka adalah pekerja keras, cerdas, dan ulet sehingga dapat bertahan hidup dan melepaskan diri dari belenggu rantai kemiskinan yaitu kemiskinan itu sendiri (Chambers, 1983). Di antara ketiga kelompok (buruh tani, petani gurem, dan nelayan) di pedesaan yang paling miskin, nelayanlah yang paling berat kehidupannya, karena mereka itu sebagian merupakan kelompok yang terusir dari daerah-daerah pertanian (Mubyarto & Kartodirdjo (1988).

Menurut Suyanto (1996), ada dua faktor yang menyebabkan munculnya kerentanan yang semakin parah di antara keluarga nelayan yaitu: (1) irama musim dimana kehidupan nelayan yang sangat dipengaruhi oleh perubahan cuaca dan alam; dan (2) faktor harga dan daya tahan ikan hasil tangkapan nelayan dimana harga ikan sangat ditentukan oleh kondisi fisik ikan tersebut. Faktor-

faktor tersebut di atas menyebabkan tingkatan pendapatan nelayan tradisional relatif rendah.

Kusnadi (2009) yang menyatakan bahwa secara umum, persoalan masyarakat nelayan berkisar pada hal-hal yang berhubungan dengan isu-isu: (1) kemiskinan dan kesenjangan sosial, (2) keterbatasan akses modal, teknologi, pasar, (3) kualitas SDM rendah, (4) degradasi sumberdaya lingkungan, dan (5) kebijakan pembangunan yang belum memihak secara optimal pada masyarakat nelayan. Masalah-masalah tersebut telah menimbulkan dampak negatif yang luas terhadap kehidupan masyarakat nelayan.

Arif Satria (2003) menganalisis tentang kemiskinan nelayan dengan mengedepankan perspektif aliran struktural daripada aliran modernisasi, yakni bahwa nelayan tidak maju (miskin) karena nelayan tidak memiliki kesempatan untuk maju (aliran struktural), bukan karena tidak mau maju (aliran modernisasi).

Kusnadi (2009) mengemukakan bahwa strategi pemberdayaan untuk mengatasi kemiskinan dapat ditempuh dengan mengembangkan dua model beserta variasinya. Pertama, model pemberdayaan

masyarakat pesisir berbasis pranata budaya atau kelembagaan sosial, dan kedua, model pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis gender. Kedua model juga bisa disinergikan dan didukung dengan program-program terkait.

Dalam pemberdayaan ekonomi nelayan yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana menanggulangi kemiskinan dan pendistribusian pendapatan dengan mengandalkan kekuatan dari masyarakat itu sendiri. Sasaran utama yang harus ditangani adalah terpenuhinya kebutuhan pokok (sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan), terjaminnya hak untuk memperoleh kesempatan kerja yang produktif, termasuk menciptakan kerja sendiri, terbinanya sarana yang memungkinkan untuk produksi.

C. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Strategi pembangunan yang sering kali dilaksanakan selama ini meliputi : *Pertama*, teori *Growth Approach* (pendekatan pertumbuhan) dan teori Rostow yang menekankan pada strategi industrialisasi dan substitusi impor dengan *investasi* dan padat modal, pengangguran pada angkatan kerja dan mengakibatkan meningkatnya kejahatan karena urbanisasi yang merupakan

tenaga kerja kurang terampil. Pendekatan ini juga memunculkan *Pseudo Capitalis* (kapitalis semu), karena mereka menjadi kapitalis karena kedekatan dengan kelompok penguasa (elit politik) dimana mereka mendapatkan kemudahan dari *regulasi-regulasi* yang ada. *Kedua*, teori *Resdistribution of Growth Approach* (pendekatan pertumbuhan dan pemerataan), pendekatan ini diterapkan pada tahun 1973 yang dikenalkan oleh Adelman dan Morris dengan menrbitkan *Economic Growth and Social Equity in Developing Countries*. Menggambarkan indikator-indikator pembangunan dalam tiga indikator, yaitu indikator sosial-budaya (tiga belas indikator), indikator politik (tujuh belas indikator) dan indicator ekonomi (delapan belas indikator). Secara teoritis pendekatan ini mudah dipahami, tetapi dalam penerapannya hal ini sangat sulit, karena masalah kemiskinan dalam perwujudan yang nyata bukanlah sekedar masalah mendistribusikan barang ataupun jasa kepada kelompok masyarakat tertentu. *Ketiga* adalah *Dependence Paradigma* (paradigma ketergantungan), teori ini dimunculkan pada tahun 1970-an oleh Cardoso. Menurutny untuk menggerakkan industri-industri membutuhkan komponenkomponen dari luar negeri

dan hal ini menimbulkan ketergantungan dari segi teknologi dan kapital. Dan distribusi pendapatan di dunia ketiga menimbulkan pembatasan akan permintaan terhadap barang hasil industri yang hanya mampu dinikmati sekelompok kecil kaum elite dan setelah permintaan terpenuhi maka proses pertumbuhan terhenti. *Keempat*, adalah *The Basic Needs Approach* (pendekatan kebutuhan pokok), teori ini diperkenalkan oleh Bariloche Foundation di Argentina. Menurut kelompok ini, kebutuhan pokok tidak mungkin dapat dipenuhi jika mereka masih berada dibawah garis kemiskinan serta tidak mempunyai pekerjaan untuk mendapatkan yang lebih baik. Oleh karena itu ada tiga sasaran yang dikembangkan secara bersamaan yaitu : - membuka lapangan kerja, - meningkatkan pertumbuhan ekonomi, - memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. *Kelima*, *The Self-Reliance Approach* (pendekatan kemandirian), pendekatan ini muncul sebagai konsekuensi logis dari berbagai upaya negara dunia ketiga untuk melepaskan diri dari ketergantungan terhadap negara-negara industry (Rukminto, 2003).

Menurut Aziz (2005) dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat diperlukan strategi-strategi tertentu sehingga tujuan

pemberdayaan dapat tercapai secara maksimal. Secara umum ada empat strategi pemberdayaan masyarakat.

1. *The Growth Strategy.*

Penerapan strategi pertumbuhan ini pada umumnya dimaksudkan untuk mencapai peningkatan yang cepat dalam nilai ekonomis, melalui peningkatan per-kapita penduduk, produktivitas, pertanian, permodalan, dan kesempatan kerja yang dibarengi dengan kemampuan konsumsi masyarakat, terutama di pedesaan. Pada awalnya strategi ini dianggap efektif. Akan tetapi, karena economic oriented sementara kaidah hukum-hukum sosial dan moral terabaikan maka yang terjadi adalah sebaliknya, yakni semakin melebarnya pemisah kaya miskin, terutama di daerah pedesaan. Akibatnya, begitu terjadi krisis ekonomi maka konflik dan kerawanan sosial terjadi dimana-mana.

2. *The Welfare strategy*

Strategi kesejahteraan ini pada dasarnya dimaksudkan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, karena tidak dibarengi dengan pembangunan kultur dan budaya mandiri dalam masyarakat maka yang terjadi adalah sikap ketergantungan masyarakat pada pemerintah. Oleh

karena itu, dalam setiap usaha pengembangan masyarakat, salah satu aspek yang harus diperhatikan penanganannya adalah masalah kultur dan budaya masyarakat. Pembangunan budaya jangan sampai kontraproduktif dengan pembangunan ekonomi. Dalam konteks yang demikian inilah dakwah dengan model pengembangan masyarakat menjadi sangat relevan karena salah satu tujuannya adalah mengupayakan budaya mandiri masyarakat.

3. The responsitive Strategy

Strategi ini merupakan reaksi terhadap strategi kesejahteraan yang dimaksudkan untuk menanggapi kebutuhan yang dirumuskan masyarakat sendiri dengan bantuan pihak luar (*self need and assistance*) untuk memperlancar usaha mandiri melalui pengadaan teknologi serta sumber-sumber yang sesuai bagi kebutuhan proses pembangunan. Akan tetapi, karena pemberdayaan masyarakat sendiri belum dilakukan maka strategi yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat ini terlalu idealistik dan sulit ditransformasikan kepada masyarakat. Satu hal yang harus diperhatikan, kecepatan teknologi seringkali, bahkan selalu, tidak diimbangi dengan kesiapan masyarakat dalam menerima dan memfungsikan

teknologi itu sendiri. Akibatnya, teknologi yang dipakai dalam penerapan strategi ini menjadi disfungsional.

4. The Integrated or holistic strategy

Untuk mengatasi dilema pengembangan masyarakat karena kegagalan ketiga strategi seperti telah dijelaskan, maka konsep kombinasi dari unsur-unsur pokok etika strategi diatas menjadi alternatif terbaik. Strategi ini secara sistematis mengintegrasikan seluruh komponen dan unsur yang diperlukan, yakni ingin mencapai secara simultan tujuan-tujuan yang menyangkut kelangsungan pertumbuhan, persamaan, kesejahteraan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, dalam strategi ini terdapat tiga prinsip dasar yang harus dipenuhi yaitu : Persamaan, keadilan, pemerataan, dan partisipasi merupakan tujuan yang secara eksplisit harus ada dari strategi menyeluruh, sehingga badan publik yang ditugasi melaksanakan harus :

1. Memahami dinamika sosial masyarakat sebagai intervensinya.
2. Memerlukan perubahan-perubahan mendasar, baik dalam komitmen maupun dalam gaya dan cara bekerja. Oleh karena itu, badan publik yang belum

memiliki kemampuan intervensi sosial akan memerlukan pemimpin yang kuat komitmen pribadinya terhadap tercapainya tujuan dari strategi holistik tersebut, yakni untuk : (a). Menentukan arah nilai organisasi, energi, dan proses menuju strategi. (b). Memelihara integritas organisasi yang didukung oleh institutional leadership.

Keterlibatan badan publik dan organisasi sosial secara terpadu. Dengan demikian, memerlukan suatu pedoman untuk memfungsikan supraorganisasi yang bertugas antara lain : (a) Membangun dan memelihara perspektif menyeluruh, (b). Melaksanakan rekrutmen dan pengembangan kepemimpinan kelembagaan, (b) Melaksanakan rekrutmen dan pengembangan kepemimpinan kelembagaan.(3). Membuat mekanisme kontrol untuk mengatur saling keterkaitan (interdependensi) antara organisasi formal dan informal melalui sistem manajemen strategis.

Dasar pemikiran filosofis yang harus dipertimbangkan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat nelayan adalah sebagai berikut (Kusnadi, 2007; 22-23) :

1. Potensi sumber daya alam yang ada di kawasan pesisir adalah karunia Allah SWT yang harus dijaga kelestariannya oleh semua pihak serta dikelola secara optimal dan berkelanjutan untuk kesejahteraan sosial-budaya dan kemakmuran ekonomi masyarakat nelayan.
2. Pengelolaan potensi sumber daya alam pesisir dan laut harus dilaksanakan oleh masyarakat pengguna berdasarkan sikap hati-hati, berorientasi pada kepentingan masa depan, serta dilandasi oleh rasa tanggungjawab terhadap Allah SWT dan anak cucu mereka karena sesungguhnya potensi sumber daya alam tersebut adalah pinjaman anak cucu.
3. Negara bertanggungjawab terhadap masa depan kehidupan warganya dan menjamin perwujudan hak-hak warganya terhadap akses sumber daya ekonomi dan lingkungan sebagai upaya menjaga kelangsungan hidup masyarakat di kawasan pesisir
4. Negara, masyarakat, dan pihak lain bertanggungjawab untuk melindungi kelestarian sumber daya alam dari berbagai bencana.
5. Kawasan pesisir merupakan “halaman depan” Negara kepulauan Republik Indonesia sehingga

pembangunan kawasan pesisir harus ditujukan untuk memperkuat ketahanan bangsa (masyarakat nelayan) menghadapi berbagai ancaman yang datang dari arah laut. Kerapuhan sosial ekonomi masyarakat nelayan berpotensi menjadi sumber ketidakstabilan politik kawasan.

Di dalam pemberdayaan masyarakat yang penting adalah bagaimana menjadikan masyarakat pada posisi pelaku pembangunan yang aktif dan bukan penerima pasif, konsep gerakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, mengutamakan inisiatif dan kreasi masyarakat, dengan strategi pokok memberi kekuatan (*power*) kepada masyarakat. Masyarakat yang lebih memahami kebutuhan dan permasalahannya, harus diberdayakan agar mereka lebih mampu mengenali kebutuhan-kebutuhannya, merumuskan rencana-rencana serta melaksanakan pembangunan secara mandiri dan swadaya. Partisipasi warga masyarakat dalam melaksanakan gerakan pembangunan tersebut selalu ditumbuhkan, didorong dan dikembangkan secara bertahap, ajeg, dan berkelanjutan. Jiwa partisipasi warga masyarakat tersebut adalah semangat solidaritas sosial, yaitu hubungan sosial yang selalu

didasarkan pada perasaan moral bersama, kepercayaan bersama dan cita-cita bersama. Oleh karena itu, seluruh warga masyarakat harus selalu bekerja bahu-membahu, saling membantu dan mempunyai komitmen modal dan sosial yang tinggi. (Kusnaka Adhimihardja dan Hary Hikmat, 2003)



BAB III

MASYARAKAT PESISIR YANG TERPINGGIR

A. Demografi Kabupaten Tuban

Kabupaten Tuban merupakan salah satu kabupaten dari 38 Kabupaten dan Kota yang ada di wilayah administratif Provinsi Jawa Timur. Wilayah Kabupaten Tuban berada di jalur pantai utara (Pantura) Pulau Jawa, terletak pada koordinat 111o 30' sampai dengan 112o 35' Bujur Timur dan 6o 40' sampai 7o 18' Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Tuban meliputi wilayah daratan dan juga wilayah lautan, luas wilayah daratan 183.994,562 Ha dan luas wilayah lautan meliputi 22.608 Km². Batas wilayah Kabupaten Tuban antara lain:

- a. Sebelah Utara : Berbatasan langsung dengan Laut Jawa
- b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro
- c. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Lamongan
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah yakni Kabupaten Rembang di bagian utara dan Kabupaten Blora di bagian selatan



Gambar 3.1 : Peta Kabupaten Tuban

Secara geologis Kabupaten Tuban termasuk dalam cekungan Jawa Timur utara yang memanjang pada arah Barat ke Timur mulai Semarang sampai Surabaya. Sebagian besar Kabupaten Tuban termasuk dalam Zona Rembang yang didominasi endapan, umumnya berupa batuan karbonat. Zona Rembang didominasi oleh perbukitan kapur. Ketinggian daratan di Kabupaten Tuban berkisar antara 5-182 meter di atas permukaan laut (dpl). Bagian utara berupa dataran rendah dengan ketinggian 0-15 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Tuban merupakan wilayah yang beriklim kering dengan variasi agak kering hingga sangat kering meliputi areal seluas 174.298,06 Ha atau

94,73% dari luas wilayah Kabupaten Tuban. Sedangkan sisanya kurang lebih 9.696,51 Ha atau 5,27% merupakan kawasan yang cukup basah.

Secara Administratif Kabupaten Tuban terbagi dalam 20 Kecamatan yang terdiri dari 311 Desa dan 17 Kelurahan. Jumlah penduduk di Kabupaten Tuban tahun 2007 hasil proyeksi penduduk mencapai 1.100.930 jiwa terbagi dalam 291.046 Kepala Keluarga (KK), dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki 543.829 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 557.101 jiwa. Dari total penduduk tersebut tercatat sebanyak 101.188 KK atau 34,7 % tergolong warga kurang mampu. Sekitar 71% atau 770.651 jiwa dari total penduduk Kabupaten Tuban bermata pencaharian dari bercocok tanam atau bekerja di bidang pertanian sedangkan sisanya merupakan nelayan, perdagangan dan pegawai negeri.

Potensi ekonomi yang dimiliki Kabupaten Tuban sangat beraneka ragam sumbernya. Selama ini potensi ekonomi yang telah dikembangkan di Kabupaten Tuban antara lain:

- a. Tanaman pangan
- b. Hortikultura

- c. Perkebunan
- d. Perikanan
- e. Peternakan
- f. Kayu pertukangan dan kayu bakar
- g. Industri pengolahan besar dan sedang
- h. Industri kecil dan kerajinan rumah tangga
- i. Perdagangan
- j. Hotel dan restoran
- k. Hasil tambang
- l. Pariwisata

Sektor unggulan yang dimiliki Kabupaten Tuban yaitu sektor pertanian khususnya tanaman pangan. Dari sektor pertanian tanaman pangan, padi merupakan komoditas yang paling diunggulkan dari ketiga komoditas lainnya yaitu jagung, kacang tanah dan ubi kayu. Potensi yang bisa ditingkatkan perkembangannya selain sektor tanaman pangan antara lain pertambangan dolomit, minyak dan gas bumi, pariwisata dan potensi besar lainnya yaitu pelabuhan laut.

Untuk mengembangkan potensi wilayah di Kabupaten Tuban telah disusun berbagai dokumen perencanaan yang akan mendukung dan menjadi bahan acuan. Pada tahun 2004 telah ditetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2003

tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) yang selanjutnya dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan dari aspek tata ruang. Selain persiapan perundang-undangan pemerintah Kabupaten Tuban juga melakukan perbaikan pada sarana jalan yang diharapkan bisa meningkatkan dan mempercepat transportasi. Target yang diterapkan pemerintah pada akhir tahun 2008 telah selesai perbaikan dan peningkatan kualitas sarana jalan penghubung antar desa yang ada di wilayah Kabupaten Tuban.

Pembangunan pertanian oleh pemerintah Kabupaten Tuban diarahkan pada program-program:

1. Pemberdayaan kelompok tani dan bantuan pinjaman modal
2. Penanggulangan dan pengendalian hama penyakit terpadu
3. Peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana di bidang pertanian
4. Peningkatan teknologi pasca panen
5. Program pengembangan agribisnis

Pengembangan potensi pertanian perlu didukung oleh ketersediaan lahan dan juga tenaga kerja, selain itu masih banyak juga faktor pendukung

lainya seperti sarana irigasi. Pengembangan potensi pertanian di Kabupaten Tuban didukung adanya lahan pertanian yang luas dan juga penduduk yang banyak. Luas lahan sawah yang ada di Kabupaten Tuban mencapai 55.371,932 Ha dan luas lahan tegalan yang mencapai 55.229,844 Ha, luas lahan pekarangan 15.524,075 Ha, luas ladang 61.000 Ha. Dari seluruh lahan persawahan yang ada sekitar 53% atau 29.299,405 Ha bisa diusahakan irigasinya baik dari irigasi teknis maupun sederhana. Sedangkan 47% atau sekitar 26.064,827 Ha merupakan lahan sawah yang tadah hujan.

Kelompok tani yang ada di Kabupaten Tuban berjumlah 1.037 kelompok yang tersebar di 318 desa dan kelurahan. Jumlah masyarakat yang menjadi anggota kelompok mencapai 95.345 orang, baik itu laki-laki maupun perempuan. Kemampuan yang dimiliki kelompok tani itu berbeda-beda sehingga jika diklasifikasikan, kemampuan yang dimiliki mulai dari pemula sampai dengan utama. Seluruh kelompok itu didampingi pembinaanya oleh penyuluh pertanian yang berjumlah 100 orang penyuluh.

Selain sektor pertanian, letak kota Tuban yang dibatasi oleh laut Jawa, sektor perikanan dan

kelautan juga menjadi perhatian pemerintah kabupaten Tuban. Kabupaten Tuban merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang mempunyai wilayah perairan laut sepanjang 65 km yang meliputi Kecamatan Palang, Tuban, Jenu, Tambakboyo dan Bancar. Dengan kondisi geografis tersebut, produksi perikanan laut di Kabupaten Tuban cukup melimpah, melebihi kebutuhan konsumsi ikan oleh masyarakat. Potensi hasil laut dan pengembangan kawasan pantai lainnya adalah budidaya rumput laut, terumbu karang, padang lamun, pengembangan dan pembibitan mangrove. Selain dari perairan laut, produksi ikan di Kabupaten Tuban juga didukung dari hasil budidaya ikan dan udang di perairan darat seperti tambak, sawah tambak, kolam, karamba dan jaring apung. Produksi ikan yang dihasilkan oleh nelayan dari penangkapan ikan di Laut Jawa dan perairan umum pada tahun 2007 mencapai 10.740,07 ton. Sedangkan produksi ikan dari perairan darat mencapai 6.139,84 ton.

Potensi sumber daya perikanan dan kelautan wilayah Kabupaten Tuban meliputi pantai, laut, perairan umum, perairan payau dan perairan tawar. Dengan mempunyai karakteristik aktivitas

perikanan pada daerah yang terletak sepanjang pantura, maka Kabupaten Tuban memiliki potensi perikanan yang besar dan tentu harus diupayakan dengan pengelolaan hasil perikanan yang baik. Adapun potensi jumlah alat tangkap yang digunakan pada wilayah Kabupaten Tuban meliputi

- a. Purseine
- b. Payang
- c. Dogol
- d. Gill Net
- e. Trammel Net
- f. Pancing
- g. Bubu

Potensi laut di wilayah Kabupaten Tuban belum berkembang sepenuhnya karena kondisi perairan laut sangat terbuka dan berpasir. Kondisi perairan seperti ini sangat cocok untuk ikan demersal (hidup di dasar perairan), contohnya adalah udang dan rajungan. Menurut tempat hidupnya potensi sumberdaya ikan di perairan Kabupaten Tuban dibedakan dalam dua jenis, yaitu ikan pelagis (hidup di permukaan) dan ikan demersal (hidup di dasar perairan). Adapun jenis-jenis ikan yang dihasilkan/ ditangkap diperairan laut di wilayah Kabupaten Tuban meliputi :

- a. Ikan Bawal
- b. Kembung
- c. Selar
- d. Tembang
- e. Udang Putih
- f. Udang Lain
- g. Teri Nasi
- h. Teri Lain
- i. Tongkol
- j. Tengiri
- k. Layur
- l. Tigawaja
- m. Petek
- n. Manyung
- o. Cucut
- p. Pari
- q. Bangbangan
- r. Cumi-Cumi
- s. Ikan hasil nelayan
- t. Rajungan
- u. Parang
- v. Kurisi
- w. Bloso
- w. Dan Lain Lain.



Gambar 3.2 :

Peluang investasi yang dapat dikembangkan adalah pengalengan ikan, industri pengolahan

tepung ikan, pindang, minyak ikan, abon, *cold storage* untuk produksi ikan beku, pembuatan terasi, pengeringan ikan, serta pengolahan limbah ikan untuk pakan ternak. Budi daya rumput laut, padanglamun, pembibitan mangrove, Sedangkan peluang investasi untuk produksi perikanan darat antara lain budidaya tambak udang, bandeng, pengolahan makanan seperti pabrik kerupuk udang, pengolahan bandeng presto, usaha restoran dengan menututama hasil laut dan ikan tambak.

B. Desa Kaliuntu, Kemiskinan di pinggiran Industri Strategis

Desa Jenu merupakan desa yang berada di pinggiran industri-industri besar kawasan Barat kota Tuban, khususnya Kecamatan Jenu. Seperti PT. Trans Pasific Petrochemical Indotama, (TPPI) lokasi satu-satunya produsen produk Petroleum dan Aromatik di wilayah Jawa Timur. Lokasi tepatnya pabrik ini adalah di jalan Tg. Awar-awar, Ds. Remen-Tasikharjo, Kecamatan Jenu. Sedangkan industri besar lainnya adalah PT Semen Gresik yang berada di sisi sebelah barat Kecamatan Jenu. Demikian juga pabrik semen milik swasta PT. Holcim Tbk. Indonesia, dan perusahaan listrik

tenaga uap (PLTU). Keberadaan Industri-industri tersebut tentu memberikan pengaruh terhadap keberadaan masyarakat desa di kawasan Kecamatan Jenu, tidak terkecuali Desa Kaliuntu. Masyarakat yang terdiri atas masyarakat nelayan dan petani pinggiran.

Oleh karena itu keberadaan industri yang dipadu dengan kondisi *human characteristic* masyarakat nelayan menciptakan kecenderungan yang lebih keras wataknya dalam berbicara, menggunakan nada yang tinggi, dan memiliki kecenderungan sifat konsumtif. Etos kerja masyarakat nelayan Desa Kaliuntu didorong oleh tiga hal pokok. *Pertama*, kebutuhan dasar hidup (subsisten) masyarakat yang harus dipenuhi untuk keberlangsungan hidupnya. *Kedua*, keluarga dengan keinginan untuk membahagiakan anak dan istri merupakan faktor penting dalam etos kerja masyarakat nelayan Desa Kaliuntu. *Ketiga*, sebagai makhluk beragama, bekerja merupakan kewajiban yang harus dijalankan. Namun ajaran agama yang begitu ideal tidak bisa diejawantahkan dalam praktek-praktek (etos) kerja oleh masyarakat nelayan Desa Kaliuntu dalam berbagai macam kondisi. Ajaran agama hanya berada dalam tataran ide yang mengawang-awang. Hasilnya, bekerja

hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Masyarakat nelayan Desa Kaliuntu sangat bergantung pada kondisi sumber daya laut. Ketika *laep* (*paceklik*) atau terbatasnya jaring masyarakat nelayan Desa Kaliuntu lebih memilih untuk menghabiskan waktu di rumah. Tidak ada pekerjaan lain (sampingan) yang dapat dikerjakan. Hal demikian juga berlaku bagi istri nelayan (perempuan nelayan). Setiap hari istri nelayan hanya bergulat pada aktifitas keseharian sebagai ibu rumah tangga. Seperti memasak hingga mengurus anak. Dalam kondisi *laep* atau kebutuhan meningkat istri nelayan lebih memilih jalan pintas seperti berhutang atau meminjam uang di Bank daripada bekerja membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Meski demikian, ada beberapa faktor lain yang meliputi naik dan turunnya etos kerja masyarakat nelayan Desa Kaliuntu. Naiknya etos kerja masyarakat nelayan Desa Kaliuntu disebabkan oleh kebutuhan yang meningkat. Seperti naiknya jenjang pendidikan anak, dateline arisan dan *buwuh* (menghadiri upacara pengantin). Sedangkan turunnya etos kerja lebih disebabkan oleh potensi sumber daya laut yang sepi (*laep*) dan terbatasnya alat untuk menangkap ikan (jaring).

Lingkungan Desa Kaliuntu nampak kurang sehat. Hal ini terlihat dari padatnya perumahan penduduk sehingga jalan atau gang sempit sekali. Demikian juga tempat memasak/mengolah ikan hasil tangkapan nelayan yang akan di jual kembali. Minimnya ruang bermain untuk anak-anak, serta tempat menjemur pakaian dan tempat parkir sepeda yang tidak pada tempatnya. Contohnya salah satu rumah nelayan, berukuran 21 m persegi yang terdiri 1 kamar tidur, ruang tamu yang juga ruang tidur bersama, dan jumlah keluarga 5 sampai 6 orang atau lebih. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa Desa Kaliuntu Jenu memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi.

Berdasarkan data kependudukan tahun 2013, jumlah penduduk Desa Kaliuntu sebanyak 2.492 jiwa yang terdiri atas 1.256 laki-laki dan 1.236 perempuan. Adapaun jumlah kepala keluarga sebanyak 664 yang terdiri atas 255 petani dan 127 nelayan. Adapun data pekerjaan penduduk tergambarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1 Pekerjaan penduduk Desa Kaliuntu

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Petani	255
2.	Nelayan	127

3.	Pegawai Negeri Sipil	46
4.	Guru	24
5.	Pengayuh Becak	5
6.	Bidan	1
7.	Pedagang	66
8.	Tukang Kayu	16
9.	Tukang Batu	23
10.	Tukang Jahit	13
11.	Persewaan	1
12.	Pensiunan	12
13.	Buruh Pabrik/industri	62
14.	Buruh Nelayan/perikanan	14
15.	Buruh tani	24
	Jumah	664

Sumber: Profil desa Kaliuntu tahun 2013

Dilihat dari tabel di atas, maka mata pencaharian petani menduduki peringkat pertama, peringkat kedua nelayan, peringkat ketiga dan keempat adalah pedagang dan buruh pabrik. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan industri besar di sekitar Desa Kaliuntu tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, karena yang terserap oleh keberadaan industri tersebut hanya 62 orang, yang berarti hanya 10,7 %. Adapun

masyarakat nelayan, sama sekali belum tersentuh dengan keberadaan industri tersebut, bahkan mungkin yang terkena imbas, karena keberadaan Industri berpengaruh pada rusaknya biota laut.

Adapun pekerjaan nelayan tradisional ini terbagi dalam dua kategori, yaitu nelayan juragan dan nelayan *mbelah*. Nelayan juragan adalah nelayan yang memiliki kapal atau perahu sendiri, sedangkan nelayan *mbelah* adalah nelayan buruh atau nelayan yang menyewa kapal. Besarnya penghasilan nelayan sangat tergantung dengan kondisi alam, bila cuaca baik maka mereka dapat menghasilkan banyak ikan ketika melaut, namun apabila cuaca tidak baik, hasil panen ikannyapun sedikit. Bahkan, bila cuaca sangat ekstrim seringkali nelayan tidak pergi melaut. Pada situasi demikian, kondisi ekonomi keluarga nelayan tradisional sangat kekurangan. Hal ini salah satunya disebabkan karena penyangga ekonomi keluarga hanya terletak pada pekerjaan suami.



Gambar 3.3 : Nelayan siap melaut

Penghasilan nelayan sangat ditentukan oleh cuaca. Ada kalanya bila cuaca buruk maka nelayan tidak melaut hingga berbulan-bulan. Namun pada saat cuaca baik, kadang nelayan mendapatkan tangkapan ikan yang banyak, sehingga pemasukan juga banyak. Bila pemasukan banyak, keluarga nelayan cenderung menghambur-hamburkan uang untuk berbelanja yang sifatnya konsumtif, misalnya membeli baju, televisi, HP, dll. Namun bila pendapatan sangat minim mereka mengandalkan pinjaman ke renternir. Situasi ini sangat di kenali oleh para renternir, oleh karena itu renternir menjamur di daerah Kaliuntu, mulai yang dari luar Kaliuntu hingga penduduk setempat yang secara ekonomi lebih dari yang lain.

Pada situasi krisis dimana cuaca sangat ekstrim dan nelayan tidak melaut, para nelayan tidak memiliki pekerjaan alternatif. Seringkali mereka malah berperilaku mabuk-mabukan. Situasi ini sangat rentan dengan kekerasan terhadap istri dan anak. Berdasarkan hasil interview dengan beberapa masyarakat sekitar, untuk mengatasi kondisi ekonomi pada saat situasi krisis ini, para istri seringkali melakukan pekerjaan mengemis bersama anaknya, atau prostitusi. Ada juga beberapa yang bekerja sebagai '*mlijo*' (berjualan sayur mayor keliling), pembuat krupuk ikan, dan pembuat ikan panggang dan pindang, serta berjualan di rumah sendiri.

C. Lingkar Kemiskinan Nelayan Kaliuntu

Kegiatan nelayan tidak bisa dilepaskan dengan keberadaan laut (potensi alam), yang sesuai geografis Desa Kaliuntu letaknya berbatasan dengan laut. Potret nelayan di Desa Kaliuntu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor teknis dan faktor non teknis. Faktor teknis meliputi skill, ilmu pengetahuan dan teknologi yang rendah, dimana dalam konteks yang ada memperlihatkan bahwa profesi nelayan adalah profesi yang alamiah, turun temurun, yang

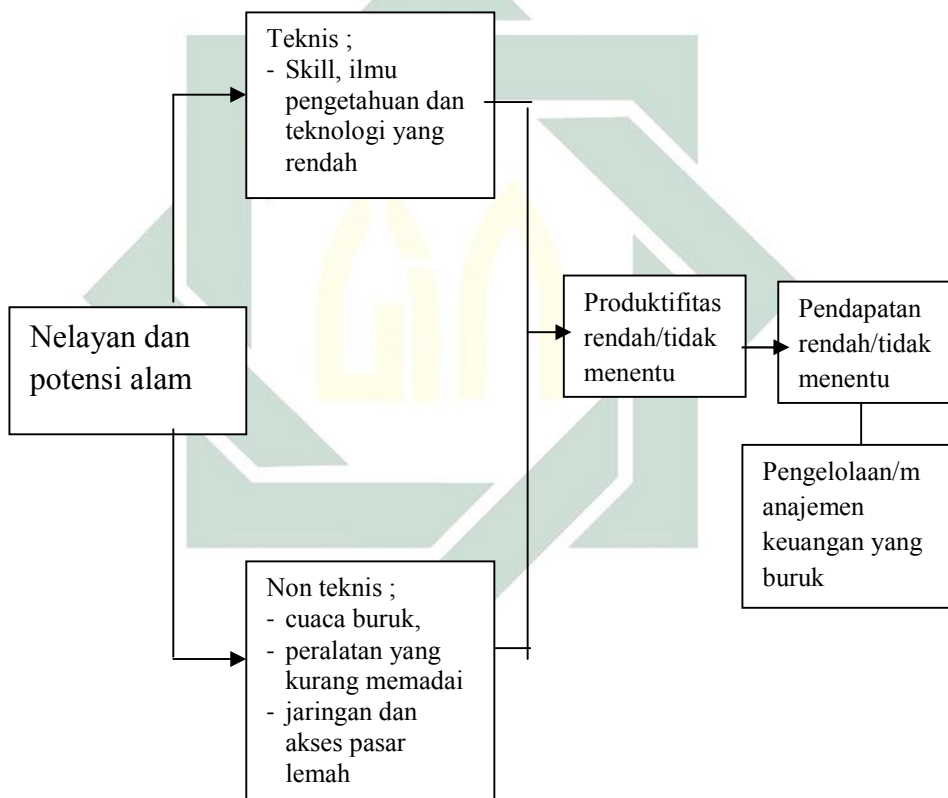
kegiatannya semata-mata berdasarkan pada pengalaman-pengalaman sebelumnya. Tidak ada sentuhan teknologi yang memungkinkan kemampuan produksi bisa dikembangkan.

Faktor non teknis meliputi hal-hal yang secara substansial berada di luar diri nelayan, namun memiliki pengaruh yang signifikan pada kemampuan produksi, dan sampai saat ini faktor-faktor itu belum bisa diselesaikan oleh para nelayan.

Akumulasi faktor tersebut secara langsung berdampak pada produktifitas nelayan yang rendah. Kalaupun tidak demikian, hal tersebut sangat berkait erat dengan faktor cuaca; yang kalau cuaca baik memungkinkan mendapatkan hasil maksimal, kalau tidak, akan mendapatkan hasil yang sebaliknya. Lebih dari itu kemampuan akses pasar yang lemah juga mempengaruhi harga dari hasil-hasil produksi nelayan. Bersamaan dengan itu secara otomatis berpengaruh pada pendapatan para nelayan yang rendah atau tidak menentu mengikuti perkembangan faktor-faktor tersebut.

Persoalan semakin rumit, ketika dari dinamika yang ada keluarga nelayan tidak memiliki kemampuan mengelola keuangan yang memadai. Situasi yang berubah-ubah tanpa didukung dengan manajemen keuangan yang baik membuat keluarga

nelayan terus-menerus berada dalam situasi yang rentan. Keamanan keuangan yang tidak menentu dan cenderung labil, menempatkan keluarga nelayan dalam ancaman kemiskinan yang bisa terjadi setiap saat.



Gambar 3.4 Skema kemiskinan Nelayan

Ada beberapa solusi yang ditawarkan oleh para sarjana untuk ‘memotong’ lingkaran setan kemiskinan di Indonesia (Nuske, 1981), yaitu: 1. Menggali potensi kekayaan alam. 2. Meningkatkan produktivitas kerja. 3. Menggiatkan masyarakat untuk menabung. 4. Memberikan pinjaman untuk modal usaha.

Menggali Potensi Kekayaan Alam.

Tuban dikenal luas memiliki kekayaan alam yang sangat potensial. Lautannya yang penuh dengan berbagai macam spesies ikan dan daratannya yang kaya dengan hasil-hasil hutan. Apakah eksplorasi kekayaan alam dapat secara langsung ‘menyentuh’ masyarakat miskin? Jawabannya mungkin “Tidak,” kecuali penggalian potensi kekayaan laut yang dapat secara langsung melibatkan masyarakat miskin di daerah pesisir. Sulit sekali untuk mengatakan bahwa penggalian potensi hutan dan perut bumi dapat menyentuh langsung masyarakat miskin. Pemanfaatan hasil hutan dan perut bumi mensyaratkan modal besar—yang jelas-jelas tidak dimiliki oleh kaum miskin.

Meningkatkan Produktivitas Kerja.

Dalam konteks masyarakat miskin di sektor pertanian, produktivitas mengacu kepada bagaimana meningkatkan hasil usaha tani. Upaya ini bisa dilakukan oleh pemerintah, misalkan, dengan mendorong para petani untuk melakukan mekanisasi dalam pemrosesan lahan pertanian, atau dengan membangun sarana/ prasarana (sistem irigasi, misalkan) untuk menunjang lahan pertanian. Upaya ini tentu dapat meningkatkan hasil tani, tetapi ia sangat sektoral yang hanya menyentuh pemilik lahan pertanian. Lebih dari itu, upaya ini tidak menyentuh langsung buruh tani dan/atau masyarakat miskin perdesaan yang tidak mempunyai lahan.

Menggiatkan Masyarakat untuk Menabung.

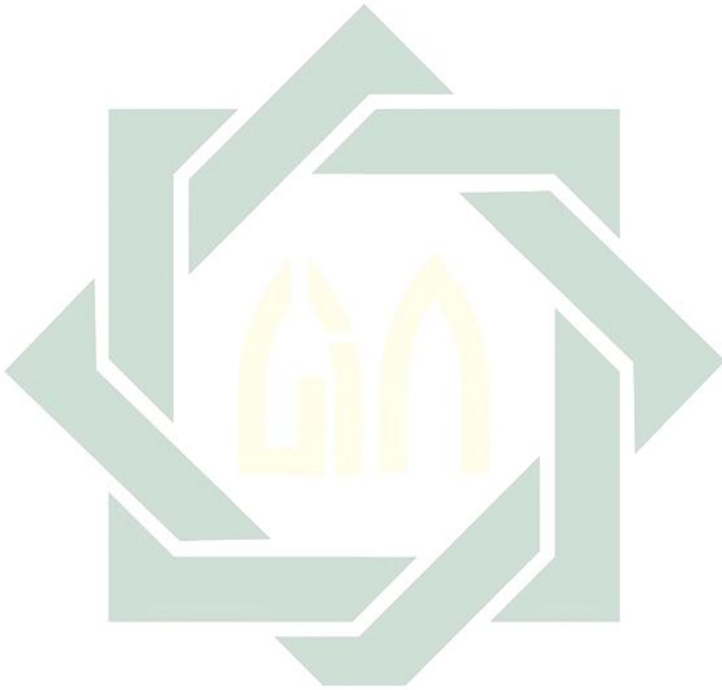
Tabungan (*saving*) dapat dimaknai, dalam arti sempit, sebagai bagian dari pendapatan uang yang pembelanjannya disimpan/ditunda sampai di kemudian hari. Jika tabungan disimpan dalam sebuah bank, maka ia dapat menciptakan pendapatan bagi pihak lain. Dalam sistem perbankan, tabungan atas nama pihak deposan menjadi dana bank untuk disalurkan kepada pihak debitur dalam bentuk kredit. Jika kredit ini dipakai

oleh debitur untuk membiayai kegiatan usaha produktifnya, maka ia bisa menciptakan keuntungan bagi debitur dan memberikan pendapatan bagi para tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan usaha itu. Masalahnya adalah bahwa masyarakat miskin, dari definisinya, tidak mempunyai sisa pendapatan untuk ditabung. Memikirkan uang untuk dibelanjakan hari ini saja sudah setengah mati, apalagi memikirkan uang untuk ditabung. Kalaupun mereka ingin mengakses dana pinjaman dari bank, mereka akan terbentur oleh kolateral. Mereka tidak mempunyai tabungan karena miskin, dan tidak dapat meminjam dana bank karena miskin pula.

Memberikan Stimulasi Modal Usaha.

Tidak adanya pembentukan modal dalam masyarakat perdesaan bisa disebabkan oleh dua hal. *Pertama*, mereka masih belum memahami manfaat dan arti pentingnya lembaga keuangan dalam memobilisasi dana-dana tabungan. Sebagai misal, kita sering melihat masyarakat perdesaan menabung dengan cara menyimpan uangnya 'di bawah bantal,' memelihara tanah persawahan, memelihara ternak, atau membeli perhiasan. *Kedua*, mereka ingin memanfaatkan peluang untung dari sebuah usaha

produktif yang digagasnya, tetapi mereka dikendalikan oleh ketersediaan modal.



BAB IV

DINAMIKA PROSES PELAKSANAAN PROGRAM

A. Focus Group Discussion (FGD) Tentang Potensi Perempuan Dalam Proses Penguatan Penyangga Ekonomi Keluarga Nelayan Tradisional

FGD pertama dengan perempuan nelayan Desa Kaliuntu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban dilaksanakan tanggal 26 september 2015. Sebelum FGD tersebut dilaksanakan terlebih dahulu dilaksanakan komunikasi-komunikasi awal dengan para tokoh dan aparat setempat, baik dalam rangka membangun komunikasi kemanusiaan awal, mengumpulkan data-data awal, juga untuk meminta ijin untuk melakukan proses pendampingan dan pemberdayaan terhadap masyarakat Desa Kaliuntu dan fokus pada perempuan nelayan.

Komunikasi awal dengan kepala Desa Kaliuntu Murtadho menunjukkan sikap positif dan menyambut baik dengan kegiatan ini. Hal ini dikarenakan warga Desa Kaliuntu masih membutuhkan pendampingan dan pemberdayaan yang lebih banyak, khususnya warga yang profesinya sebagai nelayan. Meskipun sebenarnya menurut kepala desa, warga petani juga membutuhkan uluran

tangan pemberdayaan, namun warga nelayan lebih rentan terhadap kondisi perubahan iklim, karena seringkali terjadi angin besar (dalam bahasa warga Kaliuntu disebut *barat*), sehingga mereka tidak bisa melaut atau pergi ke laut untuk mencari ikan. Informasi lain yang disampaikan kepala desa juga menunjukkan bahwa sering ada program dari CSR PT Semen dan PLTU yang melatih keterampilan kepada warga termasuk juga ada program simpan pinjam perempuan (SPP) yang diprogramkan dari proyek PNPM Mandiri perdesaan. Namun demikian kepala desa tidak menjelaskan sejauh mana keberhasilan program-program tersebut.

Komunikasi berikutnya juga dilaksanakan dengan Ketua Fatayat NU Ranting Desa Kaliuntu. Dia juga menyambut baik kegiatan yang diselenggarakan oleh tim pemberdayaan dari UIN Sunan Ampel yang memang beberapa santri dari wilayah desa ini ada yang studi pada lembaga pendidikan tinggi ini. Informasi yang disampaikan oleh Ketua Fatayat menunjukkan bahwa kondisi masyarakat pada umumnya memang baik, hanya memang kerentanan terjadi pada musim paceklik. Bagi kaum tani musim paceklik ketika masa kemarau panjang, karena petani Desa jenu adalah penggarap lahan tadah hujan dan bagi warga

nelayan peceklinya ketika musim angin besar (*barat*), sehingga mereka mengalami banyak kesulitan ekonomi ketika masa paceklik ini. Dia berharap tim pemberdayaan dari UIN Sunan Ampel bisa memberikan alternatif solusi menghadapi masa kerentanan ini, khususnya di musim paceklik.

Komunikasi berikutnya dengan tokoh agama, yaitu KH. Moh. Sholeh, pengasuh pondok pesantren Hidayatus Sholihin. Pondok pesantren ini posisinya berada di wilayah Desa Beji yang posisinya pondok ini berbatasan hanya berjarak satu meter dengan Desa Kaliuntu, sehingga pengasuh pondok ini bukan saja tokoh bagi warga Desa Beji, tetapi juga bagi warga Desa Kaliuntu. Para santri yang sekolah, khususnya yang mengaji al-Qur'an kebanyakan justru dari Desa Kaliuntu. Menurut KH. Moh. Sholeh, bahwa memang sangat diperlukan penguatan-penguatan ekonomi bagi warga Desa Kaliuntu, khususnya pada masyarakat kampung nelayan. Hal ini karena masyarakat nelayan sangat rentan terhadap kondisi paceklik. Biasanya mereka ketika paceklik menjual apa saja yang mereka miliki, mulai dari televisi, kipas angin, almari, bahkan kadang sepeda motor, hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka karena paceklik. Demikian pula mayoritas putra-putri warga kampung nelayan

tersebut adalah santri pondok pesantren Hidayatus Sholohin. Oleh karena itu, jika dilaksanakan kegiatan pemberdayaan untuk warga kampung nelayan maka sangat membantu bagi mereka, khususnya menjaga keberlangsungan pendidikan putra-putri baik pada pendidikan formal maupun pendidikan agama di pondok pesantren ini. Kyai pengasuh pondok pesantren ini juga bersedia ditempati untuk kegiatan-kegiatan warga, termasuk kegiatan pemberdayaan perempuan nelayan, sehingga tim pemberdayaan dari UIN Sunan Ampel sekaligus memohon ijin untuk menempati salah satu ruang pondok pesantren untuk pertemuan-pertemuan dalam rangka kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa Keliuntu.

Bertempat di pondok pesantren Hidayatus Sholohin, FGD pertama dilaksanakan bersama 30 orang perempuan nelayan Desa Keliuntu. FGD pertama ini belum banyak membahas agenda kegiatan, hanya dalam rangka membangun silaturahmi dan pemahaman tentang pentingnya saling belajar dan memahami diantara sesama warga dan tim pemberdayaan. Hal-hal yang muncul dari dialog dengan ibu-ibu nelayan ini adalah bahwa sebanyak 15 orang adalah sebagai perempuan yang bekerja produktif membantu suami untuk

menyangga ekonomi keluarga mereka dengan berbagai macam profesi dan pekerjaan, dan 15 orang lainnya belum memiliki profesi khusus kecuali sebagai ibu rumah tangga murni. Namun demikian, semuanya merasa sebagai penyangga ekonomi keluarga, karena meskipun posisi suami sebagai pekerja pencari ikan dengan menangkap ikan di laut, tetapi mereka menyiapkan segalanya yang terkait dengan kebutuhan suami. Baik kebutuhan yang bersifat pribadi, maupun kebutuhan untuk keperluan pekerjaan, seperti menyiapkan bekal makanan, membantu menyiapkan perlengkapan penangkap ikan, dan membantu membelanjakan beberapa kebutuhan lain seperti minyak solar sebagai bahan bakar mesin diesel, oli, dan lain sebagainya. Beberapa hal yang terkait dengan kebutuhan penangkapan ikan adalah kebutuhan konsumsi, seperti sarapan, bekal makan siang, kue-kue, rokok, dan minuman. Adapun perlengkapan lainnya, seperti es batu untuk menyimpan ikan hasil tangkapan, solar, jaring, dan perahu dengan segala mesin penggerakannya.

Dalam diskusi tersebut masing-masing anggota menjelaskan bahwa posisi perempuan dalam kehidupan rumah tangga tidak dibatasi mana pekerjaan suami dan mana pekerjaan istri, tetapi

masing-masing saling bergotong royong menjalankan pekerjaan sesuai dengan yang mereka mampu dan memiliki peluang menjalankannya. Seperti menangkap ikan ke laut, perempuan jelas tidak melaksanakannya, tetapi ketika ikan sudah didapat, perempuan ikut mengangkut ke darat, mengolahnya dengan memilah ikan, mencuci, bahkan mengeringkan, dan menjualnya. Meskipun demikian, suami juga ikut membantu istrinya mengolah ikan, jika memang suami memiliki kesempatan dan istri membutuhkan bantuan. Hampir semua rumah tangga nelayan pola pekerjaan dan pembagian kerjanya adalah sebagaimana penjelasan ini.

Disamping itu, beberapa perempuan ada yang memiliki profesi khusus yang tidak saja membantu proses pengolahan ikan yang didapat suami, tetapi juga lebih dari itu menjalankan peran produktif yang menghasilkan uang secara langsung, seperti mengolah ikan menjadi kerupuk ikan, membuat terasi udang/rebon, membuka warung nasi khusus untuk menyiapkan sarapan pagi para nelayan yang akan berangkat ke laut, jual beli ikan segar, dan beberapa profesi lain.

Seperti yang dialami ibu Munawaroh, perempuan yang memiliki anak 3 ini, setiap harinya membantu suaminya menyiapkan segala hal yang

dibutuhkan untuk menangkap ikan, tetapi ia juga mengolah hasil tangkapan suaminya menjadi kerupuk. Kerupuk yang diproduksi adalah kerupuk cumi-cumi. Jika bahan baku tepung tapioka mahal dan harga jual tidak memberikan penghasilan yang memadai, maka Munawaroh menghentikan sementara produksi kerupuknya dan beralih jual beli ikan segar. Dia membeli langsung dari nelayan yang turun dari laut, selanjutnya dia olah dan dipilah kemudian dijual kepada tengkulak sesuai dengan jenis ikannya. Hal ini tidak saja menjadikan Munawaroh memperoleh uang dari hasil kulakan ikan ini, tetapi dia memiliki pengaruh yang kepada perempuan-perempuan nelayan yang lain. Munawaroh selalu dijadikan sebagai pemuka dan ketua paguyuban perempuan nelayan karena kelincahan dan kecerdikannya dalam menata sistem ekonomi keluarganya dan lingkungannya.

Akan tetapi, nasib perempuan nelayan tidak semua seperti yang dialami oleh Siti Munawaroh. Hal ini karena beberapa perempuan nelayan yang lain tidak memiliki kecerdikan dan kelincahan dalam mengatur sistem ekonomi rumah tangganya. Bahkan ada yang sama sekali bergantung pada suami, sehingga ketika terjadi musibah, suami tidak bisa bekerja karena sakit atau bahkan sampai kecelakaan

kerja seperti terkena badai di laut atau tenggelam sampai meninggal di laut, maka posisi sangat rentan terjadi bagi keluarga-keluarga nelayan ini. Seperti kasus yang dialami oleh salah satu keluarga nelayan Kaliuntu ini. Sulistiyanti mengalami nasib yang tragis, suaminya meninggal di laut karena terkena gerakan mesin diesel. Janda Sulistiyanti ini kondisi cukup memprihatinkan karena selama ini dia belum memiliki profesi penyangga yang kuat, sepenuhnya selalu bergantung pada suami. Kondisi yang selalu bergantung pada suami ini dialami oleh 15 orang dari 30 peserta diskusi. Oleh karena itu, muncul diantara para peserta usulan-usulan agar tim pemberdayaan dari UIN Sunan Ampel memberikan penguatan agar mereka mampu menjadi penyangga ekonomi keluarga, sehingga bisa keluar dari kerentanan yang selalu mereka hadapi.



Gambar 4.1: Suasana FGD Perempuan Nelayan Kaliuntu Jenu Tuban

Kesulitan terjadi pada umumnya yang dialami oleh keluarga nelayan adalah keterjebakannya pada hutang piutang. Sebagian besar mereka memiliki tanggungan Hutang pada bank, baik BRI maupun bank yang lain. Demikian pula mereka juga ada yang terbebani hutang pada SPP (Simpan Pinjam Perempuan) PNPM Mandiri dan pada beberapa tukang kredit (istilah mereka: *mendreng*). Kalau perolehan tangkapan ikan pada kondisi yang normal, mereka tidak kesulitan mencicil hutang-hutangnya. Akan tetapi jika kondisi cuaca angin besar (*barat*) atau juga kondisi tangkapan ikan yang sangat minim, maka mereka akan kesulitan mencicil hutang. Padahal kalau pembayaran cicilan tidak memenuhi tepat waktu mereka akan kena denda. Posisi inilah yang menjadikan keluarga nelayan mengalami kebuntuan dalam mencari jalan keluar, meskipun sudah menjual berbagai barang rumah tangga sebagai harta milik yang dibelinya ketika kondisi panen.

Informasi dari hasil diskusi juga mengungkapkan bahwa kebergantungan keluarga nelayan pada pinjaman bank memang cukup signifikan. Hal ini karena untuk pengadaan perahu kapal dan segala perlengkapannya seperti mesin diesel, jaring, lampu, dan lainnya dibutuhkan dana

sekitar 25 juta sampai 30 juta rupiah. Adapaun untuk mendapatkan uang sebesar itu tanpa pinjam ke pihak lain mereka tidak akan bisa dapatkan. Oleh karena itu, peluang pinjam kemana saja akan selalu mereka cari, meskipun berbunga tinggi. Hal ini karena hanya dengan meminjam mereka bisa bekerja, dan hanya dengan bekerja mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup. Namun demikian melihat posisi nelayan yang selalu bergantung pada hutang, dan bergantung pada penghasilan tangkapan ikan laut, yang akhir-akhir ini mengalami cuaca yang tidak menentu, menjadikan kondisi keluarga nelayan semakin sulit.

Posisi perempuan atau istri dalam keluarga nelayan ini memang pada posisi yang sangat sulit. Hal ini karena posisi dia yang selalu stand by di rumah, sedangkan penagih hutang selalu datang ke rumah, sedangkan suaminya di laut. Kebiasaan masyarakat nelayan Desa Kaliuntu untuk mencari ikan ke laut (Istilah mereka: *minyang*) adalah sejak pukul 04.00 subuh berangkat dan pulanginya pukul 15.00 atau 16.00 sore. Oleh karena itu yang menghadapi penagihan hutang adalah pihak istri. Demikian pula yang terkait dengan penagihan hutang ke warung ataupun ke pemilik modal, biasanya pihak perempuan yang melakukan transaksi, sehingga

penagihan juga dilakukan kepada pihak perempuan, maka posisi perempuan selalu dihadapkan pada kesulitan dan selalu mendapatkan kata-kata kasar dan cacian oleh penagih hutang, apabila hutangnya tidak dibayar.

B. Pengorganisasian Kelompok Perempuan Nelayan

FGD berikutnya dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2015 dengan tujuan pengorganisasian untuk membentuk kelompok perempuan nelayan dan dan menjalin stakeholder yang terkait dengan penguatan perempuan nelayan Kaliuntu. Dalam FGD ini melanjutkan pembicaraan sebelumnya terkait dengan program yang dapat dijadikan sebagai penguat terhadap kondisi kerentanan keluarga nelayan Kaliuntu. Pada pertemuan kali ini menyepakati bahwa perempuan nelayan Desa Kaliuntu perlu membentuk sebuah kelompok silaturahmi bersama antar perempuan nelayan yang berbasis pada wali santri murid pendidikan al-Qur'an Pondok Pesantren Hidyatus Sholihin. Maka tiga puluh orang perempuan yang hadir bersepakat membangun kegiatan bersama dengan memperkuat hubungan mereka dan fokus pada bidang ekonomi dan pendidikan anak. Pada bidang ekonomi mereka bersepakat membangun kelompok simpan pinjam

(*saving group*) dan pada bidang pendidikan mereka bersepakat untuk selalu mendorong, memperhatikan, dan mendukung program-program pondok pesantren dalam rangka peningkatan pendidikan al-Qur'an pada putra-putri mereka.

Kelompok *saving group* disepakati sebagai sebuah wadah untuk saling menyimpan uang, sekaligus meminjam dengan maksud agar setiap bulan mereka bisa berkumpul untuk bersilatullah, disamping mereka juga melakukan ritual berdoa dan berdzikir bersama, baik dengan membaca shalawat Nabi, membaca al-Qur'an, maupun dengan membaca kalimat-kalimat *thoyyibah* yang lain. Demikian juga mereka bisa saling menabung, baik tabungan pokok, tabungan wajib setiap bulan, dan tabungan sukarela sesuai dengan sisa uang yang dimiliki. Pola yang dibangun mirip dengan wadah koperasi simpan pinjam berbasis komunitas kelompok kecil, hanya bedanya mereka tidak menetapkan bunga pinjaman, tetapi hanya infaq sukarela tanpa ditentukan besar kecilnya. Tetapi kalau untuk tabungan pokok disepakati 25 ribu rupiah, dan tabungan wajibnya dua ribu rupiah setiap bulannya. Dengan demikian mereka berharap memiliki tabungan yang secara terus menerus bertambah setiap bulan, sehingga mereka pada akhir tahun akan memperoleh laba

maupun peningkatan uang tabungan mereka yang bisa digunakan untuk keperluan pendidikan anaknya, ataupun untuk meningkatkan tabungan kelompok bersama ini.

Adapun kesepakatan-kesepakatann tersebut terbangun sebagai berikut:

- a. Nama kelompok: Forum Silaturahmi Wali Santri Hidayatus Sholihin Desa Kaliuntu Jenu Tuban
- b. Syarat anggota:
 - 1) anggota harus merupakan perempuan nelayan wali santri pondok pesantren hidayatus sholohin Kaliuntu JenuTuban.
 - 2) Harus mendaftar menjadi anggota dengan membayar simpanan pokok Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
 - 3) Menyimpan dalam bentuk simpanan wajib Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) setiap bulan.
 - 4) Menyimpan secara suka rela setiap bulan sesuai kemampuan.
- c. Bentuk kegiatan:
 - 1) Simpan pinjam (saving group)
 - 2) Pertemuan rutin setiap bulan (tanggal 20) untuk acara ritual doa (dzikir, shalawat, membaca al-Qur'an dsb).
- d. Ketentuan-ketentuan simpan pinjam

- 1) Setiap anggota harus membayar simpanan pokok Rp. 25.000,- ketika mendaftar sebagai anggota dan simpanan wajib Rp. 2.000,- per bulan.
- 2) Modal yang dimiliki dipinjam bersama secara adil.
- 3) Pembayaran pinjaman sebesar 10 kali angsuran
- 4) Tidak dipungut bunga, hanya diharapkan berinfak seikhlasnya.
- 5) Boleh pinjam lagi dengan syarat sudah melunasi pinjaman sebelumnya.
- 6) Apabila menutup pinjaman sebelum jangka waktu angsuran yang ditetapkan, maka jumlah infak sesuai dengan waktu/bulan pelunasan.
- 7) Simpanan sukarela tidak mendapatkan jasa selama sisa hasil usaha (SHU) masih masuk kas.
- 8) Sisa hasil usaha (SHU) adalah hasil infak
- 9) SHU dilaporkan setiap akhir tahun
- 10) Dalam lima tahun sekali SHU dapat dibagi sesuai dengan jasa masing-masing anggota
- 11) Tabungan masing-masing anggota tetap milik anggota, sesuai jumlah tabungan yang dimiliki.

- e. Apabila anggota keluar:
- 1) Jika mengundurkan diri
 - 2) Yang bersangkutan memperoleh simpanan pokok dan simpanan wajib yang dimilikinya.
 - 3) Harus menyelesaikan segala tanggungjawab dan kewajiban sebagai anggota.
- f. Pengurus forum bekerja secara sukarela.



Gambar 4.2: Penyerahan mandat kepengurusan Kelompok *Forum Silaturahmi Perempuan Nelayan Hidayatus Sholihin*

Setelah ketentuan forum ini disepakati, maka dipilihkan pengurus yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakilbendahara dan pembina atau pengawas.

Adapun susunan pengurus yang telah dibentuk secara aklamasi adalah sebagai berikut:

- a. Ketua : Nur Asifah
- b. Wk. Ketua : Handi Sujianti
- c. Sekretaris : Pupuh
- d. Wk. Sekretaris : Siti Nurhayati
- e. Bendahara : Siti Munawaroh
- f. Wk Bendahara : Sri Wahyuni
- g. Pengawas : Ride Robin Shurni dan Alfafah

Dalam dinamika proses pembentukan kelompok dan kesepakatan-kesepakatan mekanisme aturan saving group terjadi saling curah pendapat dan adu argumentasi, khususnya yang terkait dengan pentingnya membangun kelompok saving group dan masalah bunga pinjaman. Salah satu anggota seperti Asmaul Arifah berpendapat tidak setuju dengan dibentuknya saving group. Ia berpendapat bahwa kelompok model seperti ini nampaknya akan gagal, karena modelnya mirip dengan model simpan pinjam koperasi, bahkan ada unsur bunga bagi peminjamnya. Hal ini akan menjadi sorotan masyarakat, karena forum ini dibangun di bawah Pondok pesantren Hidayatus Sholohin. Maka akan memberi imige negatif bagi pondok pesantren, jika

forum ini mengembangkan simpan pinjam dengan bunga. Padahal bunga adalah *riba* dan *haram*. Pendapat ini juga dibenarkan oleh anggota lain seperti Nuriah dan Asri Kayati. Namun anggota forum yang lain seperti Siti Munawaroh maupun Nur Asifah berpendapat lain, bahwa kelompok seperti ini perlu dibangun, karena konsepnya tidak dibuat oleh pemerintah maupun pihak lain, tetapi dibuat oleh diri sendiri. Anggotanya adalah mereka sendiri, penabungnya mereka sendiri, peminjamnya mereka sendiri, yang menikmati hasilnya juga mereka sendiri. Bahasa demokrasinya dari anggota, oleh anggota, untuk anggota. Beda dengan SPP PNPM Mandiri, peminjamnya masyarakat, bunganya 10 %, sedangkan bunga tersebut tidak dinikmati oleh masyarakat. Apalagi dibandingkan dengan koperasi bank thithil atau bank-bank yang lain.

Akhirnya pendapat ini ditengahi oleh salah satu keluarga Pondok Pesantren Hidayatus Sholohin Ibu Ride Robbin Shurni. Dia berpendapat bahwa kelompok simpan pinjam atau saving group seperti ini sangat baik, karena bisa menolong mereka secara bersama, disamping juga bisa saling silaturahmi setiap bulannya diantara mereka. Adapun untuk masalah bunga ditiadakan, diganti dengan infaq sukarela. Kalau infaq dibatasi misalnya 1 %, tentu

masih bisa disamakan dengan bunga, tetapi kalau infaq sifatnya sukarela tidak dibatasi, maka tidak ada istilah bunga. Akhirnya dengan proses FGD yang ditengahi oleh ibu Ride ini berhasil disepakati dengan model bahwa kelompok saving group dibentuk dengan model kesepakatan di atas tanpa menggunakan bunga melainkan infaq sukarela dan simpanan pokok yang dibayar ketika mendaftar sebagai anggota dan simpanan wajib setiap satu bulan sekali.

C. Pelatihan Alternatif Pengolahan Hasil Laut

Hasil laut yang diperoleh oleh nelayan di Desa Kaliuntu nampaknya berbeda dengan hasil laut di beberapa tempat yang lain. Demikian juga cara mereka menangkap ikan juga tidak sama jika dibandingkan dengan wilayah lain. Mayoritas nelayan di desa ini menangkap ikan ke laut waktunya mulai pukul 04.00 pagi subuh sampai siang sekitar pukul 14.00 atau 15.00. Mereka berangkat dengan perahu yang diisi oleh dua atau empat orang. Dengan menggunakan jaring maupun pancing. Tidak ada nelayan yang menggunakan dengan kapal dengan skala besar dengan awak sampai puluhan orang, yang berangkat sore sampai pagi mencari ikan dengan radius yang sangat jauh.

Nelayan Kaliuntu cukup bekerja pagi sampai siang, dengan fokus pencarian yang jelas, yaitu ikan teri, udang, cumi, rajungan, atau ikan manyong. Masing-masing ikan terdapat alat tangkapnya sendiri, seperti jaring udang atau istilahnya jaring *gondrong* yang khusus untuk menangkap ikan udang, jaring cumi atau disebut juga payang hanya khusus untuk menjaring ikan cumi, basangan khusus untuk menjaring ikan rajungan, demikian juga jaring yang lain.



Gambar 4.3:
Salah satu hasil
laut tangkapan

Bentuk hasil tangkapan yang beragam mulai dari ikan manyong, cumi, sembilang, udang, teri, tongkol, dan sebagainya menjadikan tim pemberdayaan mengalami kesulitan fokus pelatihan hasil laut yang tepat. Akhirnya disepakati untuk membuat kerupuk ikan cumi sebagai fokus pelatihan untuk pelatihan alternatif hasil laut ini.

Adapun pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 31 oktober 2015 di rumah ibu Siti

Munawaroh. Perempuan yang memiliki keahlian membuat kerupuk ikan cumi. Keahlian ini pada dasarnya sudah dimiliki oleh Siti Munawaroh, tetapi keahlian ini belum ditularkan kepada perempuan nelayan yang lain. Oleh karena itu, dengan menempati rumah ibu munawaroh pelatihan kerupuk ikan cumi akan memberikan pengetahuan secara merata, sehingga perempuan nelayan akan mampu membuat kerupuk ikan cumi. Bahkan diharapkan akan menjadi semacam pusat produksi kerupuk ikan cumi yang dapat diburu oleh para penyuka oleh-oleh kerupuk ikan.

D. Pelatihan Management Pemasaran

Pemasaran adalah satu kendala utama dalam usaha kecil menengah. Masyarakat nelayan bisa memproduksi, semisal kerupuk, terasi, maupun olahan lain, namun tanpa dapat memasarkan produk mereka akan gagal juga dalam mengembangkan usahanya. Salah satu hal yang sulit dialami oleh perempuan nelayan adalah menjual produk mereka agar diminati masyarakat, bahkan kalau bisa tanpa memasarkan pembeli datang ke rumahnya. Namun hal ini tentunya tidak mudah, karena produk yang diminati pembeli adalah tentu produk yang

berkualitas, rasanya memenuhi selera pembeli, dan tentu harganya terjangkau atau murah.

Pelatihan pemasaran menjadi salah satu fokus kegiatan pemberdayaan perempuan nelayan Desa Kaliuntu Jenu ini. Pelatihan pemasaran dilaksanakan pada tanggal 7 Nopember 2015, dilaksanakan di ruang pertemuan pondok pesantren Hidayatus Sholihin. Dalam pelatihan tersebut terungkap banyak keluhan-keluhan pemasaran yang dialami oleh ibu-ibu nelayan, diantaranya: toko yang dititipi barang cenderung menolak dengan alasan barang tidak menarik, atau barang sudah ada, bahkan yang menyakitkan hati barang disepelekan dan dihargai rendah. Semisal kerupuk ikan, tentu banyak kerupuk ikan yang sudah ada di toko dan rasanya juga dianggap sama. Keluhan lain adalah pemasaran selain ke toko dilaksanakan ke pasar. Di pasar juga kurang laku, walaupun laku hanya satu dua, barang tidak habis, sehingga produksi tidak bisa lancar, karena stok barang masih banyak. Demikian juga kalau dijual di tempat wisata juga saingannya banyak, barang yang sama juga sudah banyak, sehingga awal kita menawarkan barang kepada pihak pemilik gerai di tempat wisata cenderung ditolak, atau dihargai rendah.



Gambar 4.4: Pelatihan pemasaran produk hasil laut

Keluhan-keluhan ini selanjutnya ditampung dan dilakukan upaya analisis produksi, analisis pasar, dan analisis daya beli masyarakat. Analisis produksi harus melihat beberapa aspek, yaitu bahan dasar, proses produksi, dan biaya produksi. Bahan dasar harus berkualitas, sehingga akan menjadikan produksi juga berkualitas baik rasa maupun tampilannya. Demikian pula aspek proses harus dilihat proses yang benar, bahkan pada produksi yang dibutuhkan proses tertentu, maka harus dilakukan dengan tepat sehingga akan menghasilkan kualitas produk yang baik dan menarik. Oleh karena itu, tampilan produksi sangat menentukan nilai jual, tampilan yang menarik akan menarik pembeli untuk mencobanya bahkan membelinya.

Analisis pasar perlu dilihat, dimana letak pasar yang sesuai dengan produk yang dibuat. Pasar untuk konsumsi kerupuk tentu pasar rumah tangga, tempat umum, tempat sekolah, dan tempat keramaian yang lain. Hanya saja kerupuk merupakan produksi konsumsi ringan, maka harus dilihat aspek kemasan dan kemenarikan. Kalau pasar untuk wilayah kelas menengah ke atas, tentu kemasannya harus lebih elit, sedangkan untuk pasar kelas bawah tentu lebih sederhana. Demikian juga pasar harus dilihat dari sisi kebutuhan atau permintaan. Kalau masyarakat tertentu permintaan atas terasi cukup tinggi karena kebiasaan makannya mengkonsumsi sambal terasi, maka terasi lebih cocok dipasarkan di wilayah ini. Sebaliknya jika masyarakatnya tidak suka sambal terasi tentu tidak cocok untuk pemasaran produk terasi. Demikian juga dengan produk-produk lain. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis pasar agar produk bisa dipasarkan di wilayah tersebut.

Selajutan analisis daya beli masyarakat perlu dilakukan untuk melihat daya serap produk. Jika daya beli masyarakat pada kemasan harga Rp. 1000,-, maka perlu dibutukan produk yang kemasannya harga sekian, jangan dipasok untuk kemasan dengan harga Rp. 5.000,- tentu tidak laku atau lakunya tidak banyak. Hal ini berarti kemasan produk dengan nilai

jual tertentu harus disesuaikan dengan daya beli pasar, karena itu analisis daya beli masyarakat sangat penting untuk sebuah produksi.

E. Pelatihan Packing Produk Hasil Laut

Pelatihan packing atau kemasan dilakukan sebagai tindaklanjut atas pelatihan manajemen pemasaran. Pelatihan ini dilaksanakan tanggal 13 Nopember 2015 bertempat di ruang pertemuan pondok pesantren Hidayatus Sholihin. Pelatihan ini sebenarnya lebih mengarahkan bagaimana produksi bisa menarik pasar, karena keluhan mereka sebelumnya adalah produk yang mereka hasilnya, seperti krupuk ikan, terasi, ikan kering, ikan teri kering, dsb. susah diserap pasar. Hal ini salah satu penyebab utamanya adalah faktor kemasan produk.

Kemasan produk tentu harus melihat beberapa aspek, yaitu bentuk barang yang diproduksi, kelayakan jual, nilai jual, dan keawetan serta kesehatan produk. Bentuk barang yang diproduksi misal kerupuk, tentu model kemasannya akan berbeda dengan terasi. Hal ini karena masing-masing memiliki daya tersendiri. Demikian pula kelayakan jual dan nilai jual bergantung pada pola kemasannya. Jika kemasannya asal-asalan tentu pembeli tidak akan tertarik, meskipun rasanya enak.

Pembeli akan tertarik pada tampilannya, sehingga mereka akan mencoba rasanya setelah melihat penampilannya. Hal lain yang harus dipehatikan juga aspek keawetan dan kebersihan sehingga aman untuk dikonsumsi. Maka biasanya dicantumkan tanggal kedaluwarsa setiap produk, sehingga pembeliakan percaya kalau produk ini layak konsumsi.

Gambar 4.5:
gambar
kemasan
produk
Kerupuk
Cumi-cumi
produksi Ibu
Munawaroh



Karena kemasan juga merupakan proses produksi dan tentu ada nilai biaya produksi, maka harus diperhitungkan nilai harga produksinya, sehingga harga jualnya tetap akan diperhitungkan, sehingga masih memperoleh nilai laba. Jangan sampai hanya menuruti selera tampilan menarik dengan biaya produksi mahal, sedangkan harga jualnya rendah, tentu akan merugi.

F. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk memantau tingkat keberlangsungan program dan tingkat capaiannya. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dua kali yang pertama dilaksanakan tanggal 27 Nopember 2015 dan yang kedua dilaksanakan tanggal 9 Desember 2015. Hasil monitoring yang pertama menunjukkan bahwa kelompok simpan pinjam (*saving group*) berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan bahwa pertemuan setelah dibentuknya kelompok dan pendaftar peserta kelompok simpan pinjam berkumpul dengan lengkap. Mereka berkumpul untuk membayar cicilan, menyimpan simpanan wajib, menyimpan simpanan sukarela, dan menyimpan infaq sukarela. Pertemuan pertama ini menunjukkan keberlanjutan program simpan pinjam yang berjalan dengan baik, sehingga modal awal yang dikumpulkan sebanyak 6 juta rupiah, bisa bertambah Rp. 120.000,-, dengan rincian Rp. 60.000,- dari simpanan wajib, Rp. 40.000,- dari infaq sukarela, dan Rp. 20.000,- dari simpanan sukarela. Kegiatan awal yang nampak tertib ini, jika ditindaklanjuti menjadi secara rutin dan terus menerus, maka pertumbuhan modal pasti akan berkembang dengan baik, dalam satu tahun dapat diperkirakan akan gumbuh 20 %, sehingga mereka

akan mampu mengumpulkan saving yang memadai untuk memperkuat posisi ekonomi keluarga nelayan.



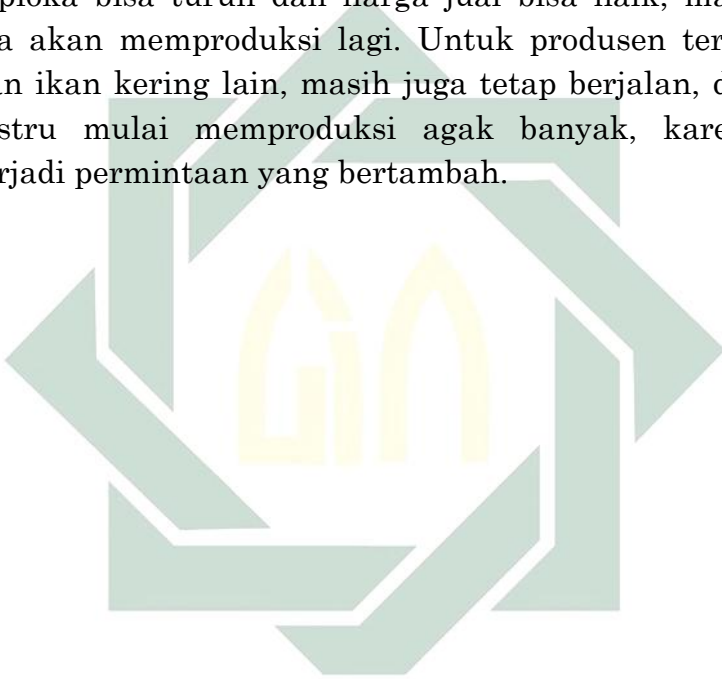
Gambar: 4.6 : Foto bersama setelah pertemuan monitoring dan evaluasi kelompok *saving group*

Namun demikian untuk usaha rumah tangga, baik yang memiliki usaha kerupuk, terasi, maupun ikan kering, belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Untuk mengembangkan produk hasil laut, pemasaran, dan pengemasan masih belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Mereka masih belum menerapkan dengan sepenuhnya apa yang didapat dari pelatihan-pelatihan selama ini. Oleh karena itu, dalam proses monitoring yang pertama ini tim pemberdayaan UIN Sunan Ampel

mencoba meyakinkan dan mendorong agar meningkatkan pola-pola produksi, pengemasan dan pemasarannya. Jika mereka masih terpaku dengan pola yang dikembangkan selama ini, padahal produk mereka tidak diminati pasar, maka mereka tentu akan merugi, bahkan bisa gulung tikar. Dorongan perubahan dilakukan oleh tim pemberdayaan, sekaligus memberikan alternatif solusi dan akan dilihat dalam perkembangan berikutnya pada monitoring dan evaluasi tahap kedua.

Pada monitoring dan evaluasi tahap ke dua yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2015 bahwa kegiatan kelompok masih tetap berjalan baik, karena memang pertemuan untuk kelompok masih dua minggu berikutnya, yakni tanggal 20 Desember 2015. Adapun untuk usaha perempuan nelayan justru muncul problem baru, salah satunya produsen kerupuk cumi menghentikan sementara produknya. Hal ini karena bahan produksi, khususnya tepung tapioka harganya naik, sehingga harga jualnya tidak mampu menutupi biaya produksi. Oleh karena itu, Munawaroh merubah posisi kerjanya dari memproduksi kerupuk ke jual beli ikan basah. Dia masih mampu mengatur pola kerjanya dari satu bidang ke bidang yang lain, meskipun masih juga tetap bertumpu pada hasil laut. Namun demikian

Munawaroh masih memiliki stok kerupuk, sehingga untuk memenuhi permintaan pembeli dia masih bisa melayani. Menurutnya sewaktu-waktu harga tepung tapioka bisa turun dan harga jual bisa naik, maka dia akan memproduksi lagi. Untuk produsen terasi dan ikan kering lain, masih juga tetap berjalan, dan justru mulai memproduksi agak banyak, karena terjadi permintaan yang bertambah.



BAB V

REFLEKSI HASIL PROSES PEMBERDAYAAN

Pemberdayaan perempuan nelayan memang berbeda dengan perempuan lain, seperti petani, ataupun perempuan miskin kota. Perempuan nelayan memiliki keunikan tersendiri dalam sistem kehidupannya. Hal ini terdapat dalam pola hidup perempuan nelayan Desa Kaliuntu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban Jawa Timur. Hal ini dapat kita lihat sebagaimana kata Kusnadi bahwa sistem pembagian kerja ini, nelayan laki-laki bertanggungjawab terhadap urusan menangkap ikan (ranah laut), sedangkan kaum perempuan mereka bertanggungjawab terhadap urusan domestik dan publik (ranah darat). Sistem pembagian kerja ini memberikan tempat terhormat bagi istri/perempuan nelayan dalam keluarga dan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, para pedagang ikan yang sukses biasanya juga merupakan istri-istri pemilik perahu, (Kusnadi, 2008: 6). Kenyataan di Desa Kaliuntu bahwa rumah tangga nelayan yang benar-benar sukses secara ekonomis hanya merupakan kelompok

kecil saja. Kebanyakan dari mereka terjerat oleh hitung piutang pada bank konvensional maupun rente yang berkeliling setiap hari di rumah-rumah nelayan Kaliuntu.

Menurut Kusnadi memang etos kerja rumah tangga nelayan miskin cukup tinggi karena mereka sudah teruji untuk bisa bekerja apa saja, asalkan bias menjamin kelangsungan hidupnya (Kusnadi, 2008: 36). Namun sampai disitu juga tetap tidak kunjung membeikan penghidupan yang layak bagi kehidupan nelayan, termasuk di Desa Kaliuntu. Hal ini karena memang posisi nelayan sangat rentan terhadap musim laut. Khususnya musim angin besar (*barat*) yang menjadikan nelayan tidak bisa pergi ke laut mencari ikan. Demikian pula musim lain yang menjadikan langkanya ikan di laut, sehingga seringkali mereka ke laut pulang tanpa membawa ikan satu ekor pun.

Kalau ditilik dari sebab-sebab kemiskinan yang diuraikan oleh Kusnadi terdapat penyebab internal nelayan sendiri, maupun sebab eksternal di luar nelayan. Sebab kemiskinan yang bersifat internal berkaitan dengan kondisi internal sumber daya manusia nelayan dan aktivitas kerja mereka. Sebab-sebab internal ini mencakup masalah: (1) keterbatasan kualitas sumberdaya manusia nelayan,

(2) keterbatasan kemampuan modal usaha dan teknologi penangkapan, (3) hubungan kerja (pemilik perahu-nelayan buruh), (4) kesulitan melakukan diversifikasi usaha penangkapan, (5) ketergantungan yang tinggi terhadap okupasi melaut, dan (6) gaya hidup yang dipandang “boros” sehingga kurang berorientasi masa depan. Sedangkan sebab kemiskinan yang bersifat eksternal berkaitan dengan kondisi di luar diri dan aktivitas kerja nelayan. Sebab-sebab eksternal ini mencakup masalah : (1) kebijakan pembangunan perikanan yang lebih berorientasi pada produktivitas untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional dan parsial, (2) system pemasaran hasil perikanan yang lebih menguntungkan pedagang perantara, (3) kerusakan-kerusakan karang, dan konversi hutan bakau di kawasan pesisir, (4) penggunaan peralatan tangkap yang tidak ramah lingkungan, (5) penegakan hukum yang lemah terhadap perusak lingkungan, (6) terbatasnya teknologi pengolahan hasil tangkapan pascapanen, (7) terbatasnya peluang-peluang kerja di sektor non perikanan yang tersedia di desa-desa nelayan, (8) kondisi alam dan fluktuasi musim yang tidak memungkinkan nelayan melaut sepanjang tahun, dan (9) isolasi geografis (Kusnadi, 2008: 18-19).

Melihat uraian tersebut, tidak semua faktor penyebab tersebut dialami oleh nelayan Desa Kaliuntu. Nelayan di desa ini memang lebih tidak berupaya mencari nilai lebih, tetapi sekedar mencari ikan sesuai waktu yang menjadi kebiasaan mereka bekerja, yaitu pukul 04.00 subuh sampai siang pukul 14.00. Mereka juga tidak mengejar ikan sampai ke laut lain, kecuali hanya dekat dengan wilayah Tuban yaitu Laut Jawa. Mereka juga tidak menciptakan sistem juragan dan buruh, karena mereka memiliki perahu sendiri, meskipun kapasitas kecil. Dari sini dapat dilihat, bahwa kehidupan nelayan Desa Kaliuntu yang bergantung pada laut serba terbatas, namun mereka tidak dijerat oleh sistem kuasa juragan. Hanya memang dari aspek eksternal, seperti program-program penguatan kepada nelayan masih belum terasa memberikan dampak yang signifikan. Penguatan selama ini hanya berupa pelatihan-pelatihan bagi ibu rumah tangga, seperti membuat kerupuk, terasi, dan olahan lain. Namun pelatihan ini tidak dibangun sampai bisa menciptakan kemandirian usaha, hanya sebatas pelatihan, sehingga kondisi mereka tetap tidak berubah.

Usaha tim pemberdayaan UIN Sunan Ampel dengan membentuk kelompok *saving group*

perempuan nelayan Desa Kaliuntu diharapkan akan membangun kekuatan ekonomi baru bagi perempuan nelayan. Karena mereka dididik dan dibiasakan melakukan saving/ menabung, bukan dibiasakan meminjam. Menabung yang dilakukan pada internal mereka sendiri, sehingga jasa kelebihannya juga akan masuk kepada mereka sendiri, bukan kepada pihak lain. Jika selama ini mereka meminjam uang di Bank ataupun SPP PNPM Mandiri, tentu jasa pinjaman dalam bentuk bunga akan mengalir kepada pihak lain. Sedangkan jika mereka menabung kepada internal mereka sendiri, disamping itu juga bisa meminjam, maka jasa uang itu akan kembali kepada mereka sendiri.

Kelompok perempuan nelayan yang berbasis pada keagamaan juga akan memberikan model penguatan yang lebih mandiri. Sebagaimana perempuan nelayan di Desa Kaliuntu ini yang membentuk kelompok dalam bentuk *Forum Silaturrahin Wali Santri Pondok Pesantren Hidayatus Sholihin*. Kelompok ini akan semakin kuat karena sisi kegiatan keagamaan akan berjalan dan sisi kegiatan mikro finance juga berjalan. Dengan demikian kekuatan ekonomi masyarakat kecil akan terbangun jika disandarkan pada tradisi keagamaan lokal. Oleh karena itu, apabila model

semacam ini dijadikan sebagai model penguatan dan pemberdayaan nelayan, niscaya kehidupan nelayan akan lebih baik.



BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Memberdayakan dan mendampingi komunitas nelayan melalui perempuan nelayan memang tidak semudah membalik tangan. Membutuhkan strategi dan teknik yang tepat, sehingga proses pembedayaan tidak sekedar melakukan pelatihan-pelatihan yang dampaknya tidak dapat dipastikan hasilnya, melainkan harus melalui proses yang dialektis. Proses tersebut adalah dimulai dari membangun kesaadaran melalui *Focus Group Discussion* (FGD). Melalui FGD dapat ditemukan problem-problem yang mereka alami, sekaligus mengetahui potensi-potensi yang mereka miliki. Melalui FGD pula dapat dibangun bertemunya pikiran (*meeting of mind*) antara tim pemberdayaan dengan anggota komunitas, sehingga dapat melangkah bersama untuk bertindak menyelesaikan problem yang mereka alami berdasarkan potensi yang mereka miliki.

Gerakan bersama komunitas perempuan nelayan dimulai dengan membentuk kelompok *saving group* (simpan pinjam) dalam bentuk *Forum Silaturahmi Wali Santri Pondok Pesantren Hidayatus Sholihin*. Dilanjutkan dengan menata sistemnya, baik kepengurusan organisasinya, mekanisme simpan pinjamnya, dan aturan keanggotaanya. Selanjutnya diperkuat kapasitas pengelolaan keuangannya dan penggunaan keuangan untuk usaha mandiri mikro rumah tangga. Penguatan bisa dilakukan dengan pelatihan produksi hasil laut, manajemen pemasaran, dan keterampilan pengemasan (*packing*). Seluruh proses ini selanjutnya dipastikan keberlangsungannya melalui monitoring dan evaluasi secara berkala, sehingga mampu menciptakan perubahan kehidupan keluarga nelayan yang lebih baik.

B. Saran dan Rekomendasi

Setelah program pemberdayaan oleh tim pemberdayaan UIN Sunan Ampel di Desa Kaliuntu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban selesai, maka hal-hal yang disarankan dan direkomendasikan oleh tim adalah bahwa untuk menindaklanjuti dan

meneruskan program yang sudah dibangun ini, khususnya kelompok *saving group* perlu dikembangkan dan dipastikan keberlanjutannya, sebab tanpa dikembangkan dan dipastikan keberlanjutannya maka akan sia-sia dan tidak memberikan manfaat apa-apa pada komunitas. Dalam hal ini, tim sampaikan kepada pengurus, pengawas, pembina, kepala desa, kyai pemangku Pondok Pesantren Hidayatus Sholohin, dan pihak lain yang berkepentingan. Semoga kerja keras tim bersama komunitas perempuan nelayan Desa Kaliuntu dapat membawa berkah dan manfaat bagi semuanya, khususnya perempuan nelayan Desa Kaliuntu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Satria., 2003., Menuju Gerakan Kelautan. *Jurnal Agrimedia*.Volume 8 Nomor 2 April
- Subade, R.F. and N.M.R. Abdullah. 1993. *Are Fishers Profit Maximizers? The case of Gillnetters in Negros Occidental and Iloilo*, Philippines, *Asian Fisheries Science*, 6:39-49.
- Chambers, Robert., 1983., *Rural Deve-lopment: Putting The Last First*. Title, USA, New York.
- Depkes RI, 1996., Rencana Strategis Departemen Kesehatan Tahun 2005 – 2009., Jakarta
- Isbandi Rukminto Adi, 2003, — *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*, Jakarta : Lembaga Penerbut FE. UI, cet. Ke-1, hal.19-27
- Kartasasmita, Ginanjar., 1996., *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. CIDES, Jakarta.

- Kartasasmita, Ginanjar., 1997., *Kemiskinan*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kusnadi, MA, Drs., 2008., *Akar Kemiskinan Nelayan.*, Penerbit : LKiS Yogyakarta
- Kusnaka Adhimihardja dan Hary Hikmat, 2003., *Participatory Research Appraisal : Pengabdian Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung : Humaniora, cet.ke-1, hal.24
- Kusnadi ,dkk., 2009., *Keberdayaan Nelayan & Dinamika Ekonomi Pesisir*.Penerbit Ar-Ruzz Media. Yokyakarta
- Mubyarto dan Kartodirdjo., 1988., *Pembangunan Pedesaan di Indonesia*. Liberty, Yokyakarta.
- Mubyarto, et al., 1994., *Keswadayaan Masyarakat Desa Tertinggal*. Aditya Media, Yokyakarta.
- Notoatmodjo S., 2003., Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku., Jakarta : Rineka Cipta

- Pranaka, A.M.W dan Prijono, Onny S., 1996., *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*, CSIS, Jakarta.
- Panayatou, T. 1992. *Management Concepts for Small-scale Fisheries: Economic and Social Aspects*. FAO Fish. Tech. Paper, 228: 53 p.
- Sumodiningrat, Gunawan., 2000., *Pembangunan Ekonomi Melalui Pembangunan Pertanian*, PT Bina Rena Pariwisata, Jakarta.
- Suyanto, Bagong., 1996., *Perangkap Kemiskinan: Problem dan Strategi Pengentasannya dalam Pembangunan Desa*. ADITYA Media, Yogyakarta.
- Tim Pemberdayaan Masyarakat pesisir PSKP Jember., 2007., *Strategi Hidup Masyarakat Nelayan.*, LKiS Yogyakarta
- Wrihatnolo, Randy R., & Dwidjowijoto, Riant Nugroho., 2007., *Manajemen Pemberdayaan. Sebuah Pengantar dan panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat.*, PT. Gramedia Jakarta

<http://tubankab.go.id>

